



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

BULETIN VIRAJATI

Media Komunikasi Online SESCOAD

Edisi VI MARET 2021

MEMBANGUN PERTAHANAN DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



ISSN 2086-9312



9772086931295

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, buletin Virajati Seskoad Online edisi ke-6 Maret 2021, kembali hadir dengan menyajikan berbagai informasi yang menarik, ide pemikiran yang segar dan aktual, serta gagasan yang inovatif, kreatif dan solutif.

Buletin Virajati kali ini mengangkat tema “Membangun Pertahanan dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”. Pada era Revolusi Industri 4.0, yang berbasis digital, dengan mengkolaborasikan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi, peran pertahanan menjadi semakin signifikan. Oleh karena itu, sektor pertahanan harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang berpengaruh besar terhadap sistem keamanan siber dan teknologi pertahanan. Disamping penguasaan teknologi, sektor pertahanan juga memerlukan organisasi dan satuan yang adaptif serta sumber daya manusia yang unggul, berkapasitas, berintegritas, serta bermotivasi tinggi guna mewujudkan kekuatan militer yang efektif dan tangguh dalam menghadapi spektrum ancaman, tantangan, dan tuntutan tugas ke depan.

Dalam buletin edisi kali ini disajikan berbagai tulisan menarik berkaitan dengan tema, antara lain : Kesiapan Satuan Membangun Pertahanan Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, Restrukturisasi Budaya Organisasi TNI AD, Strategi Mewujudkan Bangsa Pemenang dan Daya Tangkal Pertahanan guna Mengantisipasi Perkembangan Situasi. Selain itu, kepada pembaca juga disuguhkan tulisan tentang Analisis Perang terhadap Teroris, Peran OKI dalam Menghadapi Teroris, dan Pasukan Kavaleri Berkuda dalam Gerilya, serta beberapa sajian spesial lainnya.

Akhir kata, semoga untaian sajian edisi kali ini bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, dalam memberikan sumbangsih dan pengabdian terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si.

Penasihat

Brigjen TNI Marsudi Utomo, S.Sos

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani M.Sc.

Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Kolonel Czi Dian Hendiana Surachman

Sekretaris Redaksi

Mayor Inf Leo Sugandi, B.A., MMDS.

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Khairudin

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Pengatur Muda/ III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.Seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Instagram

<https://www.instagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam “Buletin Virajati” adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam “Buletin Virajati” merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



DAFTAR ISI

**KESIAPAN SATUAN MEMBANGUN
PERTAHANAN
DALAM MENGHADAPI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

4

Mayor Czi Nur Rahmat Khaeroni

**PERAN ORGANISASI KERJASAMA
ISLAM (OKI) GUNA MENANGANI
TERORISME DAN RADIKALISME**

35

Kolonel Inf Suwanto, S.I.P.

**SUDAHKAH KITABERADAPTASI?
RESTRUKTURISASI BUDAYA
ORGANISASI TNI AD
MELALUI DIMENSI PENDIDIKAN**

11

Mayor Inf Fauzan Alfikri S.E, M.M.A.S

**PASUKAN KAVALERI
BERKUDA DALAM
PERANG GERILYA**

42

Mayor Kav Widhi Bayu

**STRATEGI BESAR
MEWUJUDKAN INDONESIA
SEBAGAI BANGSA PEMENANG**

17

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc.

**KONFLIK IDEOLOGI YANG
MEMBELAH
SEMENANJUNG KOREA**

46

Mayor Inf Kukuh Prakosa, S.A.P., M.I.P.

**DAYA TANGKAL PERTAHANAN
GUNA MENGANTISIPASI
PERKEMBANGAN SITUASI
DAN ANCAMAN MELALUI BINTER**

22

Kolonel Inf Totok Sulistyono, S.H., M.M.

**PERAN DIPLOMASI DAN
NEGOSIASI DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK DI
REPUBLIK MALI**

49

Letkol Arh Dr. Heri Wijanarko, S.Sos., M.Sc.

**ANALISIS PERANG TERHADAP
TERORIS DIHADAPKAN
STRATEGI BENTUK PERANG
DI MASA DEPAN**

31

Mayor Inf Zulfani, S.Sos.

**KOPERASI JAJARAN TNI AD
SIAP MEMBANTU
BINA DAN KEMBANGKAN UMKM**

55

Kolonel Inf Masduki, S.E, M.Si.



KESIAPAN SATUAN MEMBANGUN PERTAHANAN DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Mayor Czi Nur Rahmat Khaeroni

"Know the enemy and know yourself; in a hundred battles you will never be in peril. When you are ignorant of the enemy, but know yourself, your chances of winning or losing are equal. If ignorant both of your enemy and yourself, you are certain in every battle to be in peril."

- Sun Tzu-

Pendahuluan.

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi *cyber* dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Konsep Revolusi Industri 4.0 memperluas konektivitas digital dengan dunia nyata, menggabungkan informasi digital dari berbagai sumber dan tempat yang nyata maupun maya, termasuk internet, data analitik, robotika, komputasi tinggi, kecerdasan buatan dan benda - benda dengan teknologi canggih.

Sejak kepemimpinan Patih Gajah Mada sampai Panglima Besar Sudirman, para pemimpin militer di Indonesia selalu memikirkan apakah angkatan bersenjata memiliki cukup prajurit, senjata serta Alutsista lainnya agar selalu siap digunakan dalam palagan. Dalam perkembangan lingkungan global yang penuh dengan ancaman yang baru dan selalu berkembang, kesiapan kemampuan pertahanan suatu negara selalu dijadikan patokan seberapa stabilnya negara itu mampu mengatasi segala tantangan. Menteri Pertahanan Prabowo menyatakan bahwa pertahanan Indonesia masih lemah dan masih perlu ditingkatkan. Pertahanan Indonesia masih lemah karena perekonomian Indonesia lemah. Kekayaan negara hanya bisa dijaga bila kita memiliki pertahanan yang kuat. Karena kekuatan cenderung dapat membuat sebuah entitas untuk berbuat sekehendaknya dan yang lemah hanya akan menderita. Tren yang berkembang pada kekuatan militer di beberapa negara maju di dunia, berubah dari semula hanya mempertimbangkan *man power* menjadi optimalisasi pemanfaatan teknologi, pengolahan data, komputasi, kecerdasan buatan yang belum dieksplorasi beberapa tahun yang lalu.

Pembahasan.

Pemahaman pengertian "kesiapan" dalam lingkup pertahanan selalu menimbulkan banyak perdebatan.

Kesiapan diartikan sebagai kesiapan operasional (suatu satuan) dan kesiapan organisasi (strategis). Pada konsep "*full readiness spectrum*", menggabungkan pandangan kesiapan operasional dan organisasi sehingga lebih komprehensif. Pada tingkat yang paling rendah kesiapan diartikan pada pemberian pelatihan kepada prajurit, kondisi Alutsista yang setiap saat siap digunakan serta satuan yang "sehat" dari segi kuantitas maupun kualitas. Sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi, kesiapan diartikan sebagai kemampuan militer sebagai suatu organisasi untuk bertempur sebagai suatu kesatuan dan memenuhi tuntutan tugas atau misi yang diemban. Sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada para pengambil keputusan mengenai hal yang bersifat taktis, operasional maupun strategis. Sehingga hal ini juga dapat menimbulkan tantangan berikutnya yaitu kesiapan untuk apa, kapan dan dengan konsep seperti apa, yang pada akhirnya akan bermuara pada satu pertanyaan besar, apakah kita siap memenangkan pertempuran?

Pertanyaan tersebut dapat dipecah kembali menjadi beberapa pertanyaan yang harus dipahami oleh para pengambil keputusan yaitu: 1. Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk suatu tugas yang diberikan, mencakup kapabilitas, Alutsista, aset, dan pendukung lainnya yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga pembentukan susunan satuan tugas yang tepat guna sangat penting agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu, 2. Bagaimana status dari kemampuan tersebut pada pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi personel, Alutsista dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, seberapa sehat kemampuan tersebut sehingga dapat terukur kualitasnya dihadapkan dengan perbandingan daya relatif terhadap tugas yang akan dilaksanakan, 3. Bagaimana efisiensi anggaran untuk meningkatkan kemampuan tersebut, bagaimana seharusnya aspek pertahanan berinvestasi dalam pemeliharaan, modernisasi dan pelatihan

untuk meningkatkan kemampuan.

Mengetahui Kondisi yang Sebenarnya di Lapangan.

Sistem laporan kesiapan yang ada saat ini, seperti contohnya Laporan Evaluasi Kemantapan dan Kesiapan Operasi, dirasa tidak aktual dikarenakan laporan yang diterima memiliki jangka waktu tertentu, sedangkan dinamika perubahan di suatu satuan sangat tinggi. Namun apabila kondisi kesiapan satuan dapat disajikan secara *real time*, dengan menggunakan aplikasi, peranti lunak dan sensor, hal tersebut dapat memberikan pandangan yang berbeda bagi para pengambil keputusan. Sistem yang ada memiliki kelemahan antara lain pada umumnya tidak aktual karena data yang disajikan memiliki kurun waktu dalam pembuatannya dan selalu melihat ke belakang serta data yang disajikan berupa ringkasan dari kondisi yang nyata di lapangan dan hal terperinci lain yang dapat mendasari pengambilan keputusan.

Diharapkan digitalisasi pada organisasi dapat mengatasi kendala yang dihadapi. Sistem pengawasan yang melekat dapat ditunjang dengan teknologi yang sudah ada. Contohnya adalah CCTV yang dipasang di setiap titik rawan dalam kesatrian, yang memungkinkan seorang pemimpin di satuan untuk melakukan pengawasan tanpa harus mendatangi lokasi tersebut. Bahkan dapat pula diakses melalui gawai yang terhubung melalui piranti lunak yang tertanam di dalamnya. Aliran data *real time* yang terhubung ke gawai para pengambil keputusan sangat berpengaruh untuk menghasilkan keputusan yang penting. Hal ini berarti, sebuah organisasi atau satuan dapat menghemat waktu untuk melihat langsung kenyataan di lapangan.

Kemauan untuk memulainya.

Cara pendekatan baru terhadap kesiapan berdasarkan data *real time* yang terhubung ke gawai para pengambil keputusan sangat berpengaruh untuk menghasilkan keputusan yang penting. Hal ini berarti, sebuah organisasi atau satuan dapat menghemat waktu untuk melihat langsung kenyataan di lapangan.

Cara pendekatan baru terhadap kesiapan berdasarkan data *real time* mungkin bisa saja dianggap hal yang hampir mustahil untuk dilaksanakan. Bagaimanapun, menemukan posisi dan status dari setiap Alutsista serta personel/prajurit nampaknya merupakan tantangan yang hampir tidak dapat diatasi. Namun, tugas besar yang tak mudah ini dapat dibuat menjadi lebih sederhana dengan memecahnya lagi menjadi masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola, dimana solusinya pun pasti lebih mudah didapat pula. Karena pada kenyataannya, bagian dari solusi seperti itu sudah diterapkan di beberapa perusahaan komersil yang telah menerapkan Revolusi Industri 4.0. Karena salah satu sistem dari Revolusi Industri 4.0 adalah melibatkan penggunaan informasi digital mengenai data yang ada di lapangan, untuk meningkatkan ketajaman pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil di dunia nyata. Dengan informasi yang lebih akurat, sebuah organisasi dapat menghemat waktu dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang lebih baik dan tepat.

Memang pada kenyataannya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan komersil itu tentunya berbeda dengan apa yang dihadapi oleh organisasi militer. Namun inti dari permasalahan kesiapan pada dasarnya serupa tantangan dunia bisnis dengan dunia pertahanan. Oleh karena itu, pendekatan dan teknologi yang diterapkan dalam dunia industri dapat pula dimodifikasi dan diaplikasikan dalam organisasi militer. Dunia industri yang bergulat dengan efisiensi produksi dapat dipadankan dengan dunia militer yang selalu berketat pada masalah kesiapannya. Keduanya harus benar-benar mengetahui lokasi aset mereka, kondisi komponen utama dan apakah kondisi alutsista/peralatan dapat siap memenuhi tugas yang dihadapi. Baik dunia industri maupun dunia militer harus tahu apa yang mereka butuhkan, tahu apa saja yang mereka miliki dan tahu tindakan terbaik apa yang harus mereka ambil. Bagi militer, informasi yang harus diketahui antara lain :

Pertama, Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) apa saja yang dibutuhkan untuk tugas yang akan diemban, yang berarti menghubungkan parameter penugasan dengan kebutuhan tugas dan kemampuan yang diperlukan.

Kedua, Bagaimana status kesiapan kemampuan aset yang kita miliki, yang berarti kondisi nyata di lapangan secara *real time* tentang satuan tugas dari berbagai Matra, Alutsista, moril sampai dengan personel/prajurit.

Ketiga, Bagaimana efisiensi anggaran untuk meningkatkan kemampuan tersebut, mengharuskan organisasi untuk mengolah data dan fakta yang tersaji, sehingga para pimpinan dapat mengetahui apa tindakan yang harus diambil. Menghubungkan kemampuan apa yang diperlukan dengan status kesiapan kemampuan aset, sistem dan infrastruktur dapat memberikan gambaran para pemimpin memahami lebih dalam serta membuat skala prioritas pemanfaatan anggaran yang dimiliki.

Hal-hal tersebut di atas dapat menghasilkan beberapa pemecahan masalah yang berbeda tergantung kepada sudut pandang dan latar belakang serta pengalaman yang dimiliki oleh para pemimpin. Namun hal yang pasti adalah, beberapa pemecahan masalah yang ada sudah terbukti berhasil di dunia industri.

"No plan of operations extends with certainty beyond the first encounter with the enemy's main strength."

- Helmuth von Moltke-

Mengetahui Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan.

Mengetahui kemampuan apa yang dibutuhkan dalam sebuah penugasan mungkin terdengar sederhana. Terlebih lagi dihadapkan kenyataan bahwa program latihan sudah didesain secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Kemudian, program pemeliharaan dan perawatan Alutsista juga sudah direncanakan secara berjenjang. Namun terdapat perbedaan yang besar antara operasi militer yang

direncanakan dengan operasi militer yang telah berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk benar-benar memahami seberapa siap suatu pasukan dalam melaksanakan misi, para pemimpin sudah seharusnya tidak hanya melihat apa saja yang direncanakan tapi juga sejarah satuan dan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan di masa lalu.

Hal ini lebih dari sekedar melihat sejarah dan kemampuan daya tempur. Sebaliknya, ini tentang bagaimana memahami parameter yang berbeda dari setiap palagan yang ada dihadapkan dengan rencana operasi serta variabel lainnya. Cuaca, medan, jenis operasi, musuh, pasukan sendiri dan karakteristik lainnya sangat menentukan susunan bertempur dan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) yang diperlukan dalam menjalankan tugas operasi. Penugasan di Papua membutuhkan kemampuan yang berbeda dengan penugasan di Aceh. Faktor pembeda tersebut yang harus dicermati secara jeli guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Sampai disini, pemanfaatan kecerdasan buatan dapat diberdayakan untuk memberikan hasil dari pengolahan data serta meringankan beban kerja. Saat ini, peranti lunak mengenai pengolahan data dapat membantu dalam menganalisa. Hal ini dapat diaplikasikan dalam pengolahan data mengenai jenis operasi, kekuatan musuh dihadapkan kekuatan sendiri, cuaca, medan serta karakteristik lainnya. Sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas hal apa saja yang harus dimiliki agar pelaksanaan tugas dapat tercapai. Seiring perkembangan waktu, kecerdasan buatan tersebut akan makin teruji untuk mengantisipasi kebutuhan apa yang diperlukan dan meramalkan pada tugas operasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kata lain, kecerdasan buatan dapat menyajikan data atau memberikan saran untuk penugasan di masa yang akan datang. Namun yang terpenting, data yang tersaji dan saran yang muncul tidak didasarkan pada asumsi, namun berdasarkan input serta sejarah (lesson-learned) dari penugasan operasi nyata sebelumnya.

Mengetahui Apa yang Dimiliki.

Meskipun gambaran utuh tentang kebutuhan penugasan dapat membantu dalam proses perencanaan, kemampuan yang tepat tetap menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi salah satu inti dari keberhasilan satuan. Beberapa diantaranya, memiliki persenjataan dan Alutsista yang tepat, mudah dilihat dan terukur. Sementara yang lain, dengan memiliki unsur pimpinan yang cakap dan menguasai wilayah/palagan, lebih sulit untuk diamati. Untuk itu, data dan gambaran mengenai lokasi, disposisi, status personel dan perlengkapan, infrastruktur sampai ke satuan terkecil dapat membantu mengatasi tantangan.

Sebagai contoh, pembentukan satuan khusus yang dirancang untuk ditugaskan di Papua, akan sia-sia jika tidak memiliki pengetahuan dasar tentang kebudayaan di Papua. Karena, *skill-set* yang spesifik seperti itu yang sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan satuan secara umum. Pada umumnya, satuan tugas cenderung hanya bekerja dalam hubungan satuan kecil, memadukan satuan yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda pula untuk ditugaskan menyelesaikan misi operasi tertentu. Namun, dengan gambaran yang lebih rinci tentang personel, perlengkapan dan infrastruktur, pemimpin/pengambil keputusan dapat mengkombinasikan hal tersebut dengan keterampilan dan pengalaman yang tepat, peralatan di tempat yang tepat serta pada waktu yang tepat pula untuk menciptakan susunan bertempur yang lebih mumpuni sehingga dapat menghemat aset yang dimiliki dan waktu pelaksanaan tugas. Prajurit asli Papua dapat melaksanakan infiltrasi lebih mudah dibandingkan dengan prajurit yang berasal dari Aceh.

Demikian pula, seorang Babinsa akan terlihat tidak siap operasional pada saat kita lihat penampilan luarnya saja. Namun bila kita lihat lebih dalam, pengetahuan dan keterampilannya bisa saja lebih dikedepankan, terutama mengenai keahlian komunikasi massa, penggalangan masyarakat serta

keterampilan lainnya. Penggambaran ini memerlukan data informasi yang bersifat real time, terutama tentang :

a. Peralatan. Sensor yang tertanam pada Alutsista yang dimiliki satuan, sudah mencatat dan merekam kemampuan dan daya tahan penggunaan peralatan itu sendiri (*mile age*). Dengan menggabungkan data tersebut dengan dislokasi Alutsista yang tertuang dalam suatu piranti lunak umum (seperti *Battle Management System*), para pemimpin/pengambil keputusan dapat melihat gambaran secara *detail* namun menyeluruh dan akurat tentang aset/alutsista yang ada dan siap guna serta tindakan apa yang mungkin dapat mereka kerjakan. Dapat dibayangkan betapa hebatnya bila unsur pimpinan dapat mengetahui kondisi nyata Alutsista yang dimiliki yang sudah tergelar dan siap operasi, dan mana yang mengalami kerusakan serta kekurangan membutuhkan perbaikan. Sehingga sebelum Alutsista tersebut mengalami kerusakan, maka satuan pendukung dapat melaksanakan perbaikan berdasarkan data telemetri dan sistem analisa.



Gambar 1: aplikasi kesatrian yang terintegrasi.

b. Personel. Dalam dosir, tergambarkan data tentang pengetahuan, keterampilan, kualifikasi dan pengalaman setiap prajurit. Dengan mencocokkan data tersebut dengan persyaratan yang harus dimiliki dalam suatu penugasan, dapat

memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang seringkali tidak terlihat namun berpengaruh terhadap kesiapan personel. Memilah mana prajurit yang siap operasi, dengan melihat data kesamaptaaan, moril (sudah cuti atau belum), kualifikasi (data Riwayat Hidup), latihan, dan data penunjang lainnya adalah salah satu komponen penting dalam keberhasilan pencapaian tugas. Dengan penyajian data yang rinci dan menyeluruh tersebut, pemimpin/pengambil keputusan dapat lebih matang dalam rekrutmen personel pada pembentukan satuan tugas sesuai *skill set* yang tepat dan diperlukan sesuai tugas operasi dan misi yang diemban.



Gambar 2: aplikasi pencatat data pribadi prajurit.

Teknologi *augmented reality* dapat memperbesar keunggulan data tersebut, dengan memungkinkan para ahli di bidangnya untuk turut andil meskipun secara virtual. Seorang mekanik yang berada di *homebase* dapat membantu kesulitan pengemudi kendaraan tempur di medan tugas tanpa perlu datang ke lokasi sebenarnya. Hal ini sangat bermanfaat dari segi efisiensi tanpa perlu repot mendatangkan personel ke medan tugas.



Gambar 3: penggunaan teknologi augmented reality pada mekanika.

c. Infrastruktur. Pesawat tempur memerlukan hanggar dan landasan pacu sebagaimana kapal perang membutuhkan dermaga serta tank membutuhkan garasi serta bengkel. Sensor yang terintegrasi dalam suatu pangkalan dapat memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam mengatur aktifitas di dalamnya seperti informasi pada peralatan. Data nyata mengenai infrastruktur yang dimiliki sama pentingnya dengan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.

Namun, mengumpulkan semua data saja bukanlah akhir dari tugas. Berbagai jenis data dan informasi harus disimpan dan dianalisa (*big data analysis*) sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi yang membutuhkan, baik mekanik di bengkel sampai dengan pemimpin di balik meja kerjanya. Hal ini membutuhkan analisis yang paralel dan lintas sektoral yang menghasilkan prediksi serta solusi. Dengan memiliki hal tersebut, para mekanik dapat mengerti dimana kerusakan alutsista, para pemimpin dapat melihat kondisi satuannya, sehingga *fitur data filter* dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam kesiapan operasi.

Mengetahui Tindakan yang Terbaik dan Tepat.

Dengan informasi nyata tentang kebutuhan pada penugasan dan kemampuan yang dimiliki, pemimpin dapat mengevaluasi kesiapan satuan secara detail. Tetapi itu bukan akhir dari proses perencanaan, karena yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesiapan satuan itu sendiri. Ketika ada celah, missing link, blank spot yang tidak dapat dihindari antara kemampuan yang dibutuhkan dan yang tersedia di kondisi nyata, pemimpin perlu mengetahui skala prioritas dan menginvestasikan aset dan anggaran yang dimiliki untuk menutupinya. Apakah masalah berasal dari personel, Alutsista atau mungkin taktik yang perlu ada perubahan. Disinilah pentingnya peranan kecerdasan buatan dalam menganalisa perbandingan daya tempur relatif.

Apa yang sebenarnya dibutuhkan adalah kemampuan pendukung dalam pengambilan

keputusan. Lagi-lagi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk dapat mengkalkulasikan dan memastikan bahwa kemampuan tiap satuan apabila dikombinasikan dengan tepat, dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, aplikasi dapat dijadikan sebagai laboratorium elektronik untuk menguji daya tempur satuan apabila dihadapkan dengan musuh yang sama kemampuannya. Dengan demikian para pemimpin bisa memperoleh lesson-learned dari uji coba tanpa mengeluarkan anggaran yang besar apabila dilaksanakan di dunia nyata. Dengan demikian, pemimpin/pengambil keputusan dapat memahami dimana kekurangan pada kemampuan yang dimiliki serta tahu kemana arah usaha yang dilakukan, apakah dari metode latihan dan pembekalan kemampuan, modernisasi Alutsista atau melalui peremajaan personel.

Kesimpulan.

Pergeseran tren mengenai sistem pelaporan manual (*paper-based*) mengenai kondisi kesiapan, menuju ke arah laporan informasi penyajian data *real time*, akan menciptakan perubahan besar bagi semua aspek dalam pertahanan dan khususnya militer ke arah positif. Aspek pertahanan dan dunia militer dapat terbantuan dalam hal penyajian data. Transformasi digital seringkali dapat dimulai dengan bahan baku yang sudah ada, tanpa perlu mengeluarkan anggaran yang besar pada teknologi yang mutakhir.

Faktanya, satuan TNI sudah melaksanakan hal tersebut. TNI sudah memiliki Sistem Informasi Personel yang membidangi pendataan personel baik prajurit maupun Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan TNI. Sistem ini memungkinkan para pimpinan untuk mengetahui data pribadi personel yang dapat digunakan untuk kepentingan penempatan, pendidikan, penyaluran personel sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Secara alamiah, setiap transformasi birokrasi yang massif dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun pelajaran yang dapat diambil dari organisasi lain dan upaya modernisasi dapat membantu memperlancar

transisi militer menuju kesiapan yang sebenarnya. Untuk itu perlunya disarankan beberapa hal sebagai berikut :

a. Mulai dari hal yang kecil dan sederhana.

Membuat Pilot project berskala kecil yang fokus pada satuan atau fungsi tertentu serta mengevaluasinya secara terus menerus. Hal tersebut dapat menjadi pemicu satuan lain untuk dapat menimbulkan ide baru, iklim kompetisi, dengan konsep trial and error, yang muaranya akan menghasilkan hal yang baru dan berguna bagi perkembangan satuan dalam rangka kesiapan satuan di bidang pertahanan.

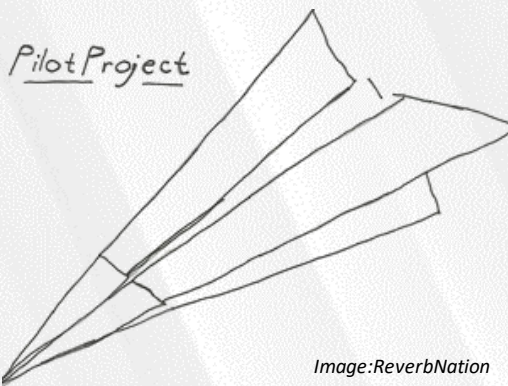


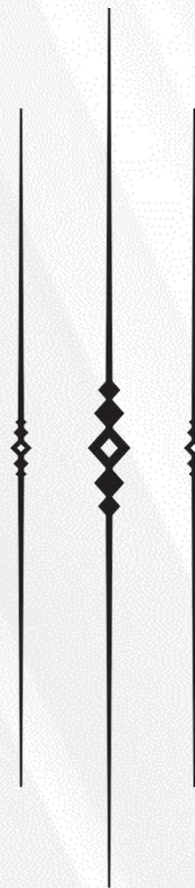
Image:ReverbNation

b. Percepatan. Atas dasar hasil dari pilot project tersebut, penyempurnaan atas hasil yang dicapai perlu dilakukan serta mengkolaborasikan dengan pilot project bidang lain sehingga dapat terbangun suatu sistem yang dapat terintegrasi.

c. Sasaran terpilih. Sebaiknya prioritas penggunaan anggaran dipusatkan kepada pembangunan yang kemungkinan besar akan membuat efek atau dampak yang besar. Penyajian data kesiapan, alasan logis betapa pentingnya pengembangan di sektor tersebut, dapat membuka mata para pemimpin, sehingga prioritas pengembangan dapat diberikan kepada konsep kesiapan yang kita ajukan.

Pada akhirnya, kemampuan pertahanan dalam militer bukan saja datang dari teknologi yang mutakhir. Melainkan bagaimana teknologi, proses dan sistem serta kemampuan personel yang mengawakinya. Revolusi Industri 4.0 adalah tentang bagaimana mengkolaborasikan aspek tersebut

menjadi satu kesatuan utuh yang tidak berjalan masing-masing. Dibekali dengan beberapa prinsip dan nilai luhur, para pemimpin pengambil keputusan diharapkan dapat menerapkan rencana dalam penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan kesiapan satuannya. Dengan mengaplikasikan teknologi yang telah terbukti dalam konteks kemiliteran/pertahanan, para pemimpin dapat memiliki gambaran penuh dan real time mengenai satuannya.



Mayor Czi Nur Rahmat Khaeroni, adalah abituren Akmil tahun 2004 dan lulusan Goh Keng Swee Command and Staff College/50th CSC tahun 2019 di Singapura, saat ini menjabat sebagai Ps. Pabandyasunstrahanrat Bidjianbangstrahanrat Sdirjianbang Seskoad.

SUDAHKAH KITA BERADAPTASI?

Restrukturisasi Budaya Organisasi TNI AD Melalui Dimensi Pendidikan



Mayor Inf Fauzan Alfikri S.E, M.M.A.S.

Pendahuluan

Untuk menjaga eksistensinya, organisasi dituntut untuk terus belajar, bergerak, dan beradaptasi secara kontinu terhadap dinamika lingkungan operasional sesuai 'domain'-nya. Apabila tidak, organisasi akan kalah berkompetisi yang akhirnya punah. Sebagai contoh, bagaimana *Nokia* yang dulunya menjadi diktator di bidang telepon seluler, namun kini telah runtuh, karena lambatnya adaptasi, dan tidak mampu berkompetisi dengan sistem operasi seperti *apple* dan *android*. Kasus ini mungkin tidak berlaku bagi TNI AD, karena TNI AD merupakan organisasi pemerintah yang akan terus dipertahankan eksistensinya. Faktor 'zona nyaman' inilah, yang mungkin berimplikasi pada keterlambatan transformasi internal TNI AD. Memang secara kasat mata, TNI AD telah banyak melakukan perubahan semenjak berjalannya era reformasi baik dari peran, tugas, postur, doktrin dan strategi. Namun, ada hal mendasar yang terlupakan, yaitu transformasi budaya organisasi. Seberapa pentingnya budaya organisasi ini? Budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi kinerja TNI AD, karena budaya akan berimplikasi pada iklim bekerja, cara berpikir, level motivasi, dan etika dari individu prajurit ataupun unit kerja. Diibaratkan gunung es, budaya organisasi merupakan batu besar di dasar laut yang tidak tampak dari permukaan.¹

Schein mengatakan budaya organisasi dibangun dari berbagai asumsi, yang telah dipelajari, diuji, dan dinyatakan cocok dan valid untuk dapat beradaptasi eksternal dan berintegrasi internal, sehingga secara berkelanjutan diterapkan dalam suatu organisasi.² Dengan kata lain budaya telah menjadi 'akar' dalam *mindset* organisasi. Oleh karenanya, walaupun organisasi TNI AD secara kasat mata, berjalan dilandasi regulasi formal seperti doktrin dan petunjuk, namun budaya berupa norma, nilai, asumsi, dan kepercayaan yang hadir secara tidak tertulis, dapat membayangi, bahkan dengan tidak disadari mengatur perilaku berorganisasi.

Lingkungan strategis ke depan diprediksi akan dinamis, ambigu, dan penuh dengan ketidakpastian. Berbagai analisis dari pengamat militer telah dilakukan, untuk menemukan formulasi karakteristik budaya organisasi yang relevan. Stephen Pierce mengatakan bahwa karakteristik budaya organisasi militer yang dibangun perlu mengedepankan fleksibilitas, diskresi dan inovatif.³ Terlepas dari budaya seperti apa yang nantinya akan diterapkan oleh TNI AD, namun pastinya, dalam bertransformasi, diperlukan langkah praktis yang komprehensif, integral dan terpadu agar menyentuh 'akar' dari budaya organisasi. Tulisan ini mengambil contoh budaya organisasi 'fleksibilitas, diskresi dan inovatif' sebagai model untuk dikomparasikan dengan budaya TNI AD. Fleksibilitas dapat diartikan

¹ Pierce James, *Is The Organizational Culture of The U.S. Army Congruent With The Professional Development of Its Senior Level Officer Corps?* (US Army War College, 2010), 11, diakses pada 15 Februari 2021, <https://www.files.ethz.ch/isn/120800/pub1015.pdf>, disitasi dari Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership* (Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA, 1992).

² Tharp Bruce M, *Defining "Culture" and "Organizational Culture": From Anthropology to the Office*, diakses pada 15 Februari 2021, https://www.therecgroup.com/files/resources/Defining-Culture-and-Organizationa-Culture_5.pdf, disitasi dari Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership* (Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA, 1992), 2.

³ Pierce James, v.

tidak kaku, mudah dan cepat beradaptasi; diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan secara mandiri dalam berbagai situasi; dan inovatif adalah kemampuan menemukan suatu kreasi yang baru.⁴ Dari sample model ini akan diidentifikasi persoalan budaya organisasi TNI AD, siapa subjek yang berperan untuk mengubahnya, apa domain 'inti' yang berperan krusial dalam pembentukan subjek tersebut, dan bagaimana strategi untuk mewujudkan sampel budaya tersebut secara holistik.

Sifat Dasar (*Nature*) Budaya TNI AD.

Schein menyatakan apabila organisasi ingin mengantisipasi langkahnya di masa depan, 'mereka' harus memahami 'akar' yang menjadi konsep abstrak budaya organisasi.⁵ Oleh karenanya, perlu dianalisis apa karakteristik budaya organisasi TNI AD dan bagaimana proses pembentukannya. *Stephen Robbins* menjelaskan bahwa proses pembentukan budaya dimulai dari tahapan rekrutmen (*selection*).⁶ Penulis berpendapat, sifat dasar (*nature*) budaya TNI AD juga dibangun melalui proses rekrutmen, seleksi dan pelatihan di masa lalu yang mengadopsi sistem PETA, KNIL, bangsa barat, dan suku Jawa. Pembentukan budaya pendidikan TNI AD dimulai dari dominasi instruktur alumnus PETA yang merupakan didikan tentara Jepang. Mereka menerapkan karakter 'fasis', mengutamakan militansi, kekerasan dan kekuatan fisik di pendidikan militernya.⁷ Selain itu, budaya Jawa khususnya tradisi pewayangan, kultur patrimonialistik (*bapakism*), dan 'sistem kelas' (*sentana, priyayi*) cukup mempengaruhi pendidikan TNI AD, sehingga karakter 'feodal' dengan hirarki struktural yang kental, sedikitnya tertanam dalam '*mind-set*' prajurit. Pada tahun 1950-an, TNI AD mulai mengirimkan perwiranya belajar di Amerika Serikat untuk mendapatkan pendidikan militer

profesional, sekaligus studi komparasi. Perwira yang kembali dari AS mengadopsi '*Thayer Method*' yang diterimanya di *West Point*, dan diterapkan di Akademi Militer (*Militaire Academie, MA*).⁸ *Thayer Method* ini menjadikan ilmu Matematika sebagai '*core*' dari semua pelajaran, menerapkan penghitungan matematis pada setiap proses pengambilan keputusan, menerapkan model resitasi, dan sistem grading pada setiap aktivitas.⁹ Dari kesemua budaya tersebut, terjadilah proses akulturasi, sehingga diadopsilah karakteristik militansi, kepatuhan, respek, jiwa korsa, resitasi, 'ilmu pasti' dan kompetitif menjadi 'formula' pendidikan TNI AD dalam membentuk prajuritnya.

Pendidikan TNI AD mengedepankan aspek karakter (afektif dan psikomotoris, dibandingkan intelektualnya (karakter > intelektual). Petinggi di lembaga pendidikan Akademi Militer (Akmil) di masa lalu, meyakini bahwa TNI AD dilatih bukan untuk menjadi kaum intelek (akademisi), namun menjadi pemimpin yang berkarakter,¹⁰ sehingga 'formula' yang teridentifikasi tadi, diterapkan dalam metode pendidikan TNI AD. Oleh karenanya, tidak heran apabila di lembaga pendidikan (Lemdik) TNI AD menerapkan metode *massed learning*, dengan cara memberikan tugas yang bertubi-tubi kepada siswanya, baik *paper*, ataupun penyiapan alat perlengkapan, dan PUDD, hingga siswa tersebut kurang memiliki waktu untuk belajar mandiri ataupun beristirahat. Model ini semata-mata demi membentuk karakter militansi dalam *mindset* prajurit. Dengan asumsi bahwa karakterlah yang utama, model pembelajaran *regimented* (kaku, serba diawasi) dan *teacher-centric* (didikte), serta metode 'ilmu pasti' dan resitasi, juga diterapkan, sehingga pembentukan aspek kognitif dalam hal analisis, inovasi, dan kreativitas dinomorduakan.

Asumsi mengenai model pendidikan dalam membentuk karakter seperti ini diyakini

4 KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskresi>.

5 Pierce James, xiii.

6 Putro Robertus, *The Professionalisation of the Indonesian Military* (School of Humanities and Social Sciences, New South Wales, 2012), 113, diakses pada 17 Februari 2021, <http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:10921/SOURCE01?view=true>.

7 Ibid, 113, disitasi dari Britton, *Military Professionalism in Indonesia*, 57.

8 Ibid, 117.

9 Connors, E, *The Thayer Method: Student Active Learning With Positive Results*, 104, diakses pada 18 Februari 2021,

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=jmsce_vamsc.

10 Putro Robertus, 133

berhasil, karena banyak pemimpin pada *level* nasional, bahkan internasional di forum PBB, yang berasal dari TNI AD pada masa itu,¹¹ sehingga menjadi budaya yang diyakini untuk terus diterapkan hingga saat ini. Namun, apakah ini benar-benar berhasil? Tidakkah memang saat itu (orde lama dan baru) TNI AD diberikan keleluasaan mendominasi seluruh dimensi, bahkan masih memiliki '*legacy*' hingga saat ini? Apabila ditilik lebih jauh, apakah pemimpin di level nasional itu 'murni' sebagai *output* pendidikan TNI AD tanpa pengaruh dari latar belakang pendidikan sebelumnya, dan domain institusional lainnya? Budaya yang ada di lembaga pendidikan secara tidak disadari membekali *culture-set* dan membentuk pola pikir SDM 'calon' pemimpin yang dibawa dan diterapkan pada unit kerjanya. Dari metode pendidikan yang diterapkan tadi, sebenarnya *culture-set* dan *mind-set* seperti apa yang akan terbentuk? Mari kita analisis melalui beberapa pertanyaan; Apa kira-kira *outcome* yang dihasilkan dari model pendidikan karakter > intelektual? Pola pikir seperti apa yang terbentuk dari metode 'ilmu pasti' dan resitasi? Bagaimana kepribadian yang terbentuk dari kultur patrimonialistik (hirarki kelas, *bapakism*)? Apa bentuk mentalitas yang dihasilkan dari model *regimented* (serba diawasi) dan *teacher-centric* (didikte)? Jawaban dari seluruh pertanyaan inilah yang akan tertanam menjadi *sub-culture* (budaya kelompok), dan lama kelamaan menjadi *dominant-culture* (budaya yang dominan) dalam budaya organisasi TNI AD. Lantas, apakah model pendidikan tersebut relevan dengan pembangunan karakteristik budaya organisasi yang fleksibel, diskresi dan inovatif?

Pemimpin Membentuk dan Mengubah Budaya Organisasi.

Pemimpin memiliki peran yang krusial dalam pembentukan dan perubahan budaya organisasi dilihat dari dua hal yaitu kewenangan dan penentuan visi

organisasi. Schein mengatakan bahwa pemimpin dan budaya organisasi ibaratkan dua sisi koin yang tidak terpisahkan.¹² Sejalan dengan Robbins yang mengatakan bahwa penentu dari karakteristik budaya organisasi adalah *foundernya*.¹³ Sebagaimana Steve Jobs menentukan budaya organisasi dalam Apple inc, Jeff Bezos di Amazon, dan Elon Musk di Tesla. TNI AD mungkin tidak ada *founder* seperti Steve Jobs yang menentukan budaya organisasinya, namun sebagaimana dijelaskan di awal, budaya TNI AD terbentuk melalui akulturasi pengaruh kolonialisme, nilai-nilai sejarah perjuangan, adat istiadat, dan jati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara nasional dan tentara rakyat. Ketika budaya itu hadir, budaya itulah yang menentukan karakteristik pemimpin organisasi, selanjutnya pemimpin tersebutlah yang bertanggung jawab mengelola budaya organisasi ketika terdapat disorientasi ataupun disfungsi agar sejalan dengan perubahan lingkungan.¹⁴ Mengapa demikian? Karena pemimpin memiliki *positional power* yang tidak dimiliki oleh anggota organisasi. Secara legalitas, pemimpin memiliki otoritas untuk memberikan perintah terhadap anggota organisasi, dengan kata lain, pemimpin tidak hanya saja bisa bermimpi dan memiliki ide seperti anggotanya, namun mereka memiliki *power* (kewenangan) untuk merealisasikan mimpi tersebut menjadi kenyataan.

Pendidikan dalam Membentuk Pemimpin.

Ada yang berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan, namun tidak sedikit riset yang menyatakan bahwa pemimpin itu dibentuk oleh tiga domain yaitu institusional (pendidikan dan pelatihan), operasional (pengalaman, lingkungan unit kerja) dan pengembangan diri secara mandiri (*self development*).¹⁵ Dari ketiga domain ini manakah yang paling krusial dalam membentuk 'calon' pemimpin militer? Penulis berpendapat, domain institusional (pendidikan) lah yang paling krusial.

¹¹ Ibid, 115

¹² Schein Edgar, *Organizational Culture and Leadership*, (Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA. 1992). 22.

¹³ Robbins Stephen P., *Organizational Behaviour*, 17th edition (Pearson Education, 2017), 537.

¹⁴ Schein Edgar, 22

¹⁵ Annis Franklin, *A Better Model of Leader Development; Repairing the Education Philosophy within Army Leader Development*, 2018, diakses pada 18 Februari 2021, <https://medium.com/experientia-et-progressus/annis-leader-development-3e6fca77ebfc>

Mengapa? apabila kita analisis, kontribusi domain operasional terhadap pembentukan karakter 'calon' pemimpin tergantung pada budaya yang *exist* (hadir) di dalamnya, kembali lagi, budaya unit kerja ditentukan oleh 'atasan' yang lebih dulu hadir di unit kerja itu, yang mana sebelumnya dididik melalui domain institusional. Apabila pemimpin di unit kerja tersebut membawa iklim dan budaya yang positif, tentunya akan berkontribusi pada pembentukan karakter positif 'calon' pemimpin, dan begitu pula sebaliknya. Analogi yang sering digunakan adalah seekor 'macan kecil' yang masuk dalam komunitas domba, lama-kelamaan akan bermetamorfosa dan berperilaku seperti domba, begitu juga berlaku sebaliknya. Bagaimana dengan domain *self-development*? domain ini turut ditentukan oleh positif atau negatifnya domain institusional dan operasional, karena pengembangan 'calon' pemimpin secara mandiri memerlukan *self-direction* (arah) yang *distimulus* melalui dunia pendidikan, unit kerja, dan mentor (senior). Dari sini terlihat bahwa domain institusional yang berperan signifikan pada pembentukan 'iklim' domain operasional dan *self-development* yang akan mempengaruhi karakter 'calon pemimpin'.

Pendidikan berperan untuk indoktrinasi, doktrinasi, dan penambahan ilmu secara kognitif, afektif dan psikomotoris, atau di TNI AD dikenal dengan nama tripola dasar. Stephen Robbins mengatakan bahwa tahapan sosialisasi budaya dimulai dari *prearrival*, *encounter*, dan *methamorphis stage*. *Prearrival stage* merupakan tahap pendidikan dan pelatihan, *encouter stage* adalah tahap ketika masuk dalam organisasi, dan *methamorphis stage* adalah proses metamorfosa atau adaptasi.¹⁶ Pada tahap *prearrival* atau pelatihan, indoktrinasi dan doktrinasi dilakukan untuk membentuk 'figur' personil yang dibutuhkan sesuai spesifikasi organisasi. Ini

Jelas menggambarkan bahwa peletakan fondasi 'calon' pemimpin organisasi dimulai dari domain institusional atau pendidikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila ingin mewujudkan budaya organisasi yang mengedepankan fleksibilitas, diskresi dan inovatif, dari domain inilah dimulai untuk ditanamkan pada *mind-set* dan *culture-set* 'calon pemimpin'.

Restrukturisasi Budaya Secara Integral.

Hasil analisis dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa '*nature*' budaya TNI AD tercipta dari *culture-set* 'pemimpin' yang awalnya dibentuk melalui domain institusional, sehingga penulis berpendapat, untuk merestrukturisasinya perlu diawali kembali dari domain tersebut. Lantas, siapakah yang dikatakan pemimpin di TNI AD? Mereka adalah para unsur komandan dan kepala mulai dari unit terkecil yaitu regu, peleton, kompi, batalyon hingga unit tertinggi. Oleh karenanya untuk merubah budaya TNI AD perlu konsep integral yang mengintegrasikan 'formula budaya' (fleksibilitas, diskresi dan inovatif) di seluruh strata pendidikan 'calon' pemimpin mulai Sekolah Calon Bintara (Secaba), Akmil hingga pendidikan pengembangan tertinggi di TNI AD yaitu Seskoad.

Untuk mewujudkan budaya yang fleksibel, diskresi dan inovatif, porsi aspek intelektual dan karakter yang diterapkan di Lemdik para 'calon' pemimpin harus proporsional (karakter = intelektual). Militansi sebagai keunggulan dari karakter TNI AD tidak boleh dihilangkan, namun perlu di '*upgrade*', tidak hanya difokuskan pada aspek afektif, namun juga pada aspek kognitif atau intelektual. Militansi kognitif dapat diilustrasikan dengan; 'calon' pemimpin yang *addictive* (candu) terhadap suatu disiplin ilmu, selalu merasa 'haus' ilmu, kritis dan 'candu' untuk mengevaluasi dan menganalisa masalah, tidak berhenti mencari solusi-solusi masalah dari tinjauan

¹⁶ Robbins Stephen P., 539.

berbagai literasi. Tentunya untuk menumbuhkan spesifikasi ini, perlu stimulan yang memacu daya analisis (*thinking about thinking*) ‘calon’ pemimpin. Sebagai contoh, penerapan persoalan argumentatif dan komparasi studi kasus dalam metode pendidikan. Persoalan tidak lagi ‘kaku’ dengan kunci jawaban yang ‘baku’, namun perumusan jawaban harus ditinjau dari analisis ‘gap’ berbagai literasi, yang akhirnya muncul daya inovasi ‘calon’ pemimpin untuk meng-kreasi suatu teori yang baru. Dengan metode ini akan tertanam budaya analisis, kritis, kreatif dan inovatif yang akan menjadi *subculture*, dan berkontribusi pada transformasi budaya organisasi TNI AD.

Metode pendidikan idealnya dapat *menstimulus* kedewasaan berpikir, kemandirian, dan kemampuan komunikasi peserta didik sebagai ‘calon’ pemimpin. Seorang ‘calon’ pemimpin tidak harus selalu diawasi dan didikte, namun diberikan kedewasaan untuk mengatur ritme belajarnya secara mandiri. Jangan ‘gatal’ melihat peserta didik yang santai, karena pendewasaan pola pikir dan kepribadian membutuhkan proses yang tidak mudah. Suasana pembelajaran khususnya interaksi antara tenaga pendidik (Gadik) dan peserta didik (Serdik) perlu dibangun seharmonis mungkin, batas-batas hirarki sementara diputus, agar *menstimulus* ‘calon’ pemimpin untuk kritis dan berani berargumentasi. Sebagai contoh, pendidikan militer di Amerika Serikat, diterapkan kebijakan ‘no salute area’ (area tidak perlu hormat) di lingkungan kampusnya, sehingga terciptanya keharmonisan antara Gadik dan Serdik yang berkontribusi pada aspek psikologis Serdik. Dengan metode ini akan tertanam budaya fleksibilitas dan diskresi dalam *culture-set* ‘calon pemimpin’ yang akan dibawanya saat memimpin di unit kerjanya.

Penutup

Untuk mengimplementasikan model pendidikan seperti di atas, TNI AD perlu menyusun konsep pembelajaran atau kurikulum pendidikan secara integral dan terpadu, agar sinkron di setiap level pendidikan. Mark Priestley mengatakan kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Ini mengandung arti bahwa kurikulum adalah ‘nyawa’ nya Pendidikan, tanpa nyawa,

pendidikan akan mati. Berkaca pada pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) memiliki kurikulum skala nasional yang dijadikan pedoman dan diterapkan di seluruh sekolah negeri. Pada era 1980-1990 an, pendidikan nasional menerapkan kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), pada periode awal 2000-an menerapkan kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan terakhir hingga saat ini diterapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bagaimana dengan TNI AD? Apa ‘jenis’ kurikulum yang diterapkan? Setiap Lemdik memiliki kurikulum masing-masing, namun tidak memiliki pedoman ‘model’ pendidikan seperti apa yang diinginkan TNI AD, dapat dikatakan TNI AD belum memiliki kurikulum berskala ‘nasional’. Beberapa Lemdik telah berupaya untuk adaptif dengan menerapkan berbagai sistem yang dinilai relevan seperti *adult learning system* (sistem belajar dewasa), *case method* (studi kasus), ataupun *experiential based learning* (sistem belajar berbasis pengalaman). Namun, apakah sistem pendidikan yang sebenarnya harus diterapkan? Apakah Lemdik-Lemdik itu memahami tujuan dari metode yang diterapkannya? Dan apakah ini tersinkronisasi dengan Lemdik lainnya? Oleh karenanya, tugas TNI AD di level pusatlah yang mengintegrasikan berbagai variasi konsep pembelajaran ini. Sudah saatnya, TNI AD memiliki kurikulum terpadu atau suatu konsep belajar (*learning concept*) yang sedikitnya menjelaskan, menentukan tujuan dan metode pendidikan yang terintegrasi, mulai dari level pendidikan terendah hingga tertinggi. Sehingga, semua level pendidikan memiliki acuan kemana arah pembentukan ‘calon’ pemimpin, apa spesifikasi yang dibutuhkan, dan metode apa yang perlu diterapkan untuk mewujudkan spesifikasi tersebut.

Ketika seluruh pendidikan TNI AD terintegrasi, akan membentuk *sub-culture* yang seragam, dan berkontribusi pada perubahan budaya TNI AD secara holistik.

Cameron dan Quinn mengatakan apabila organisasi memiliki fokus pada norma yang sama, dan asumsi yang sama, akan mengeliminasi komplikasi, diskoneksi dan rintangan yang dapat menghalangi efektivitas kinerja.¹⁷ Sejalan dengan pernyataan ini, ketika budaya fleksibel,, diskresi, dan inovatif ini dibawa oleh 'calon' Komandan Regu, Peleton, Kompi, Batalyon, dan Brigade ke unit kerjanya, akan mempengaruhi *culture-set* anggota organisasinya.

Komandan Regu hingga Komandan Brigade akan mengartikulasi visi yang seirama, menggunakan *positional power*, untuk mengubah budaya yang telah hadir sebelumnya menuju '*true north*' (utara sebenarnya) sehingga performa organisasi meningkat. Ketika perubahan budaya itu berhasil, tentunya akan berkontribusi pada pembentukan iklim kerja yang positif. Para Tamtama dan Bintara Remaja yang baru masuk satuan akan merasakan iklim yang positif ini, sehingga mereka akan tetap bermetamorfosa sesuai 'identitas' dirinya sebagai 'macan' ketika dewasa. Dengan gerakan perubahan secara integral ini, akan mendorong terwujudnya restrukturisasi budaya TNI AD menuju budaya yang mengedepankan fleksibilitas, diskresi, dan inovatif.



Image: Surabaya-Bisnis.com

Mayor Inf Fauzan Alfikri S.E, M.M.A.S. adalah abituren Akmil 2005, lulusan United States Command and General Staff College 2020. Saat ini menjabat Pabandya Sunopsdik Bidopsdik Sdirdik Seskoad



STRATEGI BESAR MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI BANGSA PEMENANG



Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc.

1. Pengantar.

Era globalisasi menghadirkan kecenderungan tertentu dan timbulnya kompetisi antar bangsa yang cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang ketat, baik yang bersifat global, regional, maupun nasional.¹ Kondisi di atas juga berpengaruh langsung pada situasi dunia dan munculnya isu-isu aktual, antara lain bergesernya isu pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis ke arah isu-isu demokratisasi, lingkungan hidup, hak asasi manusia dan terorisme serta bentuk-bentuk kejahatan lainnya berupa, kejahatan lintas negara yang didalangi oleh aktor-aktor nonnegara (*non-state actor*), antara lain *arm smuggling*, *human trafficking*, pelanggaran wilayah perbatasan, pencurian kekayaan alam, serta penyelundupan barang.

Globalisasi yang sedang terjadi ini telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal tersebut membawa dampak bahwa ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer.

Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain sebagai subsistem pertahanan negara, pertahanan nonmiliter memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Evaluasi di lingkungan strategis Indonesia, baik global, regional, maupun nasional, didapatkan satu gambaran atau peta ancaman atau tantangan yang dihadapi negeri ini pada 2017.² **Penyebaran paham dan pengikut ISIS di Asia Tenggara masih menjadi ancaman global yang akan dihadapi Indonesia, pemerintah akan tetap fokus pada permasalahan maraknya pembalakan liar, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba, penyebaran ajaran radikalisme melalui internet, terorisme, dan tindakan intoleransi juga menjadi persoalan.** Pemerintah akan mempercepat program-program untuk mengantisipasi semua ancaman tersebut. Dalam persaingan global dan nasional muncullah ancaman militer dan non-

1. Naisbitt dalam Koento Wibisono S., *Pancasila dan Era Globalisasi dalam Visi ABRI Menatap Masa Depan*, UGM UP 1997, halaman 107.

2. Menhan dalam <https://newswire.id/content/hadapi-tantangan-kekinian-bangsa-indonesia-harus-terus-bangun-nasionalisme>

militer, permasalahan nasional, perebutan kepentingan dalam pangan dan minyak dunia, radikalisme, narkoba, menurunnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi besar untuk jadi bangsa pemenang dalam persaingan tersebut.

Apabila tidak direncanakan sebuah strategi besar dan seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Akibat lain adalah ketahanan nasional di bidang pangan rendah, terjadi masalah yang krusial di bidang ideologi dan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat dan dampak kompleksitas bangsa yang lebih luas yang mengancam ketahanan negara sebagai bangsa yang berdaulat.

2. Strategi menuju sebagai bangsa pemenang.

a. Tantangan Indonesia saat ini.

Dalam era global saat ini sungguh sarat dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang didalamnya. Persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang setiap detik. Disini sangatlah jelas harus adanya upaya reformasi untuk sebuah perubahan yang dapat menjawab semua tantangan perkembangan era global, terlebih bagi Indonesia wajib untuk mengantisipasi dan merencanakan lebih awal. Era Global abad 21 ini sungguh memiliki banyak tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh kita semua untuk bisa berbenah diri dalam peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) didalamnya, termasuk pula ada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi

yang kesemuanya bermuara pada kompleksitas masalah di bidang ideologi dan politik, ekonomi, dan sosial budaya

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, di masa mendatang persaingan dengan negara-negara lain akan semakin meningkat. Namun, hanya negara dengan sumber daya manusia (SDM) unggulan yang akan menjadi pemenang.³ Di mana-mana sekarang ini antar negara berkompetisi secara ketat maka dengan kompetisi ini maka bangsa Indonesia **harus menjadi pemenang kalau mau selamat**. Semangat gotong-royong dan sebagai bangsa pejuang tidak dimiliki oleh bangsa lain dan dahulu bangsa Indonesia bisa merdeka karena gotong-royong dan berjuang.

Negara yang penduduknya tidak siap akan tergerus dan hanya menjadi penonton, untuk itu masyarakat Indonesia harus memperkuat komitmen persatuan dan kesatuan bangsa. Songsong masa depan dengan membangun umat yang berkualitas, bersatu, dan bersinergi dengan berbagai komponen bangsa lainnya.

Untuk menjadi bangsa pemenang, menurut Presiden RI Jokowi⁴ yang harus dilakukan adalah **membangun konektivitas antar daerah, memangkas hambatan birokrasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)**. Presiden kala itu, mengajak untuk bersama-sama saling mengisi, saling sharing, saling menutup adanya kekurangan-kekurangan yang kita punyai dan dengan kerja keras dan kerja sama itu saya yakin negara kita benar-benar bisa menjadi negara yang baldatun toyyibatun warobun ghofur.

Hal ini menunjukkan para pimpinan nasional sangat konsensus dan berkomitmen dengan permasalahan tantangan bangsa dan harus dijawab dengan bangsa Indonesia harus menjadi bangsa pemenang untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

b. Kontribusi dan pengaruh lingkungan strategis.

Pengaruh lingkungan strategis yang dominan secara signifikan pengaruhnya antara

3. <https://www.beritasatu.com/nasional/530843/tantangan-meningkat-panglima-tni-negara-dengan-sdm-unggul-jadi-pemenang> (Kamis, 3 Januari 2019, 21.37)

4. <http://obsessionnews.com/jokowi-jadilah-indonesia-sebagai-bangsa-pemenang/> (Jumat, 11 Agustus 2017, 14.55)

lain adalah menyangkut masalah **jumlah penduduk dunia** yang berjumlah 7,5 miliar, jumlah 7,5 miliar kalau orang tidak apa-apa dan itu hanya sebuah angka, tapi apabila kita lihat ada teori yang sudah diuji bahwa daya tampung bumi untuk orang hidup normal itu hanya untuk 3 atau 4 miliar manusia. Disinilah mulai kelihatan bahwa angka 7,5 miliar sudah melebihi hampir dua kali lipat dari daya tampung bumi. Hal ini diperparah dengan kebutuhan manusia selain makanan adalah **energi dan minyak**. Menurut informasi bahwa 2046 cadangan minyak akan habis bila tidak ditemukan tempat yang signifikan. Mengapa bisa habis karena cadangan yang ada diambil terus sedangkan jumlah penduduknya bertambah terus. Berikutnya ancaman narkoba, pada tahun 2016 ini 2% jumlah penduduk Indonesia atau 5,1 juta terlibat Narkoba. Ini merupakan fenomena gunung es. Bangsa Indonesia masuk dalam perang candu yang tujuannya adalah untuk membuat *lose generation* yang nantinya generasi bangsa Indonesia ke depan adalah generasi yang bodoh karena kena candu sehingga mudah ditipu, mudah dibodoh-bodohi. Indonesia sudah dipersiapkan untuk berkompetisi global dengan membuat generasi-generasi mudanya tidak mempunyai potensi.

c. Strategi besar ke depan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang.

1) Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut

dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik dan sebagainya.

Di sisi lain, isu demokratisasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya adalah selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik, dengan tetap mempertahankan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut: *mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.*

2) Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*) belum sepenuhnya memihak kepentingan negaranegara berkembang. Dengan kata lain negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini: Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat, pertanian dijadikan prioritas utama, karena

mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan WTO, mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

3) Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting, ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi, dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat.

Pengaruh dari luar perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha *memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa*

yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

3. Penutup.

Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan simpulan sebagai berikut:

a. Dalam lingkungan strategis Indonesia, baik global, regional, maupun nasional, didapatkan satu gambaran atau peta ancaman atau tantangan yang dihadapi negeri ini pada 2017. **Penyebaran paham dan pengikut ISIS di Asia Tenggara masih menjadi ancaman global yang akan dihadapi Indonesia, pemerintah akan tetap fokus pada permasalahan maraknya pembalakan liar, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba, penyebaran ajaran radikalisme melalui internet, terorisme, dan tindakan intoleransi juga menjadi persoalan. Pemerintah akan mempercepat program-program untuk mengantisipasi semua ancaman tersebut.**



Image: suara.com



Image: suara.com



Image: Quizizz

b. Dalam persaingan global dan nasional muncullah ancaman militer dan non-militer, permasalahan nasional, perebutan kepentingan dalam pangan dan minyak dunia, radikalisme, narkoba, menurunnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi besar untuk jadi bangsa pemenang dalam persaingan tersebut.

c. Untuk menjadi bangsa pemenang, yang harus dilakukan adalah **membangun konektivitas antar daerah, memangkas hambatan birokrasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).**

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc adalah abituren Sepa Wamil 1990 dan lulusan Seskoad 2005. Saat ini menjabat sebagai Widyaiswara bidang Strategi dan Kawasan Seskoad.



DAYA TANGKAL PERTAHANAN GUNA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN SITUASI DAN ANCAMAN MELALUI BINTER

Kolonel Inf Totok Sulistyono, S.H., M.M.

Pendahuluan.

Sejarah peradaban manusia telah mencatat bahwa kecenderungan manusia atau bangsa untuk berkuasa atas bangsa lainnya sangat besar dengan berbagai alasan mulai dari rivalitas personal para pemimpin hingga perebutan sumber daya alam. Pada sebagian besar sejarah perang atau invasi atas suatu bangsa oleh bangsa lainnya, terlihat bahwa invasi dilakukan oleh negara yang kekuatannya lebih besar kepada negara lainnya yang lebih lemah. Ketika sebuah negara dianggap kuat oleh negara lain, maka kecenderungan untuk diinvasi akan menjadi kecil, inilah yang kemudian disebut sebagai daya tangkal pertahanan. Dengan demikian, dapat diartikan secara lebih luas bahwa apabila suatu negara atau bangsa menginginkan sebuah perdamaian di negaranya, terbebas dari kekhawatiran atas ancaman negara lain, maka negara atau bangsa tersebut perlu memiliki kekuatan pertahanan yang memadai.

Bagi Indonesia, ancaman invasi terbuka dari negara lain atau perang secara konvensional merupakan sebuah kemungkinan yang sangat kecil terjadi. Namun, ancaman-ancaman lainnya terhadap integritas NKRI sangat potensial terjadi, bahkan beberapa diantaranya merupakan ancaman faktual yang telah dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Lepasnya beberapa wilayah terluar dari kedaulatan NKRI serta pelanggaran wilayah kedaulatan dan provokasi oleh negara lain

menunjukkan bahwa integritas kedaulatan NKRI masih rentan terhadap ancaman.

Permasalahan-permasalahan faktual tersebut merupakan indikator besarnya potensi ancaman terhadap integritas NKRI. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa banyak negara yang melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang tidak memiliki kekuatan pertahanan yang patut diperhitungkan. Dengan kata lain, daya tangkal pertahanan Indonesia masih sangat rendah untuk dapat menjaga kedaulatannya sendiri. Keterbatasan kemampuan anggaran negara untuk membeli alutsista pertahanan seringkali dijadikan kambing hitam atas persoalan-persoalan yang muncul, berkait dengan rendahnya kemampuan pertahanan negara. Sebagai sebuah negara yang merdeka dari imperialisme asing berkat perjuangan seluruh rakyat, sebenarnya Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar, yaitu kekuatan pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Namun, sistem pertahanan semesta yang dimiliki Indonesia tentu saja berbeda dengan sistem pertahanan dengan mobilisasi umum yang dimiliki oleh negara-negara kecil seperti Singapura dan Israel yang dikenal dengan sebutan **National Resilience** dimana setiap warga negara telah dilatih melalui kegiatan wajib militer dan diatur untuk menduduki jabatan militer tertentu pada saat

negara menghadapi perang. Pelibatan rakyat Indonesia masih diharapkan dalam bentuk dukungannya terhadap komponen utama pertahanan negara, yaitu TNI, dalam menghadapi setiap ancaman yang mungkin timbul terhadap integritas NKRI.

TNI Angkatan Darat sebagai bagian integral dari TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara di darat dan mempertahankan keutuhan wilayah darat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan wajib militer bala darat bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Sesuai Doktrin TNI AD “ Kartika Eka Paksi “ salah satu fungsi utama TNI AD adalah Binter, yang diselenggarakan guna menunjang keberhasilan tugas pokok TNI AD, khususnya di dalam penerapan sistem pertahanan semesta.¹ Penyiapan dan penyelenggaraan Sistem Pertahanan Semesta memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan segenap komponen bangsa, karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya wilayah telah terbagi habis oleh fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, Pembinaan Teritorial merupakan salah satu solusi yang paling tepat dilakukan untuk menciptakan daya tangkal pertahanan negara di tengah-tengah rendahnya kemampuan negara untuk membangun kekuatan inti pertahanan yang memadai akibat dari kecilnya alokasi anggaran negara yang diberikan pada bidang pertahanan.

Binter sebagai Salah Satu Solusi Paling Realistis

Tinjauan historis

Dalam perjalanan sejarah merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan

penjajah Belanda, terlihat dengan jelas bahwa semangat kerakyatan, semangat kesemestaan dan semangat kewilayahan timbul secara spontan terlihat pada saat menghadapi agresi militer Belanda II yang terkoordinir di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Perlawanan dilancarkan berdasarkan strategi dan taktik yang tertuang dalam **Perintah Siasat Nomor 1**. Seluruh potensi yang ada ikut serta menghadapi Belanda, sesuai kemampuan dan profesi masing-masing yang kemudian kita sebut dengan **perang rakyat semesta**.² Pada waktu itu, Angkatan Perang Indonesia disusun dalam Batalyon Mobil dan Batalyon Teritorial. Batalyon Mobil untuk melaksanakan penghambatan gerakan musuh dan menjadi tenaga penggempur dalam susunan Batalyon, Kompi dan Peleton. Sedangkan Batalyon Teritorial mengadakan penjagaan Kabupaten demi Kabupaten, menyebar menjadi inti gerakan gerilya rakyat di bagian daerah yang lebih kecil seperti Distrik dan Onderan atau Kecamatan. Organisasi Kewilayahan ketika itu adalah Komando Militer Daerah (KMD), Komando Distrik Militer (KDM), Komando Onder Distrik Militer (KODM) dan Kader Desa. Gelar inilah yang menjadi cikal bakal Komando Teritorial (Koter) yang saat ini kita kenal dengan Komando Kewilayahan (Kowil), yang merupakan gelar kekuatan TNI AD, dan diyakini sebagai gelar yang memiliki efek tangkal serta sebagai langkah dini dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yang disusun secara mendalam.

Dalam perjalanan sejarah mempertahankan keutuhan NKRI, terdapat berbagai peristiwa pemberontakan bersenjata dan makar politik seperti pemberontakan PKI Madiun, Permesta, DITII, G.30.S/PKI, GAM, RMS dan lain- lain, semua dapat teratasi karena adanya dukungan rakyat yang penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerja sama dan soliditas inilah yang saat ini kita sebut dengan

[1] Penjelasan lengkap dapat dibaca pada Keputusan Kasad Nomor Kep/01/2/2007 tanggal 15 Februari 2007 Tentang Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

[2] Penjelasan lebih lengkap tentang pelaksanaan Perintah Siasat No 1 dapat dibaca pada: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, *Route Perjuangan Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman*, CV. AMI GLOBAL MEDIA, Jakarta, 2008, hal. 19

Kemanunggalan TNI-Rakyat, yang merupakan salah satu kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI, maka dari waktu ke waktu kebersamaan TNI-Rakyat harus dibangun dan dipelihara melalui Pembinaan Teritorial.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI, sesungguhnya peran Binter sudah mengemuka dan sangat dominan dalam membangun kemanunggalan semua komponen bangsa dengan tentara saat itu menjadi suatu kekuatan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan saat perang kemerdekaan mereka bahu-membahu mengusir penjajah yang ingin kembali menguasai NKRI. Namun, dalam perjalanannya peranan Binter yang telah membawa bangsa ini tetap kokoh kuat, telah menjadi rancu karena pengaruh kepentingan politik/kekuasaan, sehingga Binter yang seharusnya berperan hanya untuk kepentingan pertahanan negara telah ditumpangi kepentingan politis di luar kepentingan politik negara.

Tinjauan Konstitusional

Binter TNI AD kini telah dilakukan reposisi, redefinisi dan reaktualisasi peran dan fungsinya sejalan dengan diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sehingga kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan TNI/TNI AD, dalam penyelenggaraan Binter telah mengacu serta tidak bertentangan dengan materi/substansi Undang-Undang tersebut. Substansi penting yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan Binter pasca UU No 34 Tahun 2004 saat ini adalah bahwa TNI AD tidak lagi menempatkan diri sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam pembinaan teritorial. Namun, TNI/TNI AD telah mereposisi dirinya sebagai pihak yang membantu tugas pemerintah dan atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan sesuai fungsinya. Oleh karenanya, dalam Implementasi Binter di lapangan harus selalu dalam format kerja sama dengan instansi terkait.

Meskipun secara tekstual yuridis dalam UU 3/2002 yang mengatur pertahanan negara maupun UU 34/2004 yang mengatur TNI tidak secara eksplisit mencantumkan Pembinaan Teritorial, namun pasal-pasal dalam dua Undang-Undang tersebut secara substansial merupakan kegiatan Binter yang selama ini telah dilaksanakan TNI AD. Dalam hal ini Binter dipahami sebagai manajemen, kemampuan dan atau metode/cara untuk mendukung tercapainya tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan bagi kepentingan kesiapan pertahanan negara di darat.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2 salah satu bentuk tugas dan Operasi Militer selain perang yang dilaksanakan TNI adalah untuk “**memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta**” sedangkan pada pasal 8 d, menyatakan tugas Angkatan Darat adalah “**melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat**”. Dalam rangka terdukungnya tugas tersebut, TNI AD harus melakukan berbagai upaya, pekerjaan, dan tindakan agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses. **Upaya, pekerjaan dan tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang disebut dengan Pembinaan Teritorial**, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasi ataupun pembinaan. Jadi Pembinaan Teritorial adalah kebijakan manajemen atau cara atau metode yang ditempuh TNI AD dalam mewujudkan tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai amanah konstitusi dalam rangka mewujudkan kesiapan pertahanan negara di darat.

Binter sebagai Fungsi Utama TNI AD

Mengalir dari korelasi Binter TNI AD dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan pengertian Binter dalam perspektif teknis militer dan dalam perspektif kegiatan.

Dalam perspektif teknis militer Binter merupakan salah satu istilah teknis dalam kemiliteran; sedangkan dalam perspektif kegiatan Binter yang dilakukan TNI AD adalah

upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan Aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan apek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AD.

Pada hakikatnya Binter TNI AD adalah kegiatan penyiapan **wilayah pertahanan** dan **kekuatan pendukungnya** secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan **Kemanunggalan TNI-Rakyat** melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat.

Bila dilihat dari tujuannya, Pembinaan teritorial dapat dilihat dari 3 perspektif yang berbeda yaitu perspektif **kepentingan Hanneg**, dimana Binter bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka **memenangkan peperangan**. Sedangkan dalam perspektif **kepentingan masyarakat**, Binter bertujuan untuk membantu **mengatasi kesulitan masyarakat**. Selain itu dalam perspektif **kepentingan TNI AD**, Binter bertujuan untuk **tercapainya tugas pokok TNI AD**.

Sebagai salah satu Fungsi Utama TNI AD, Pembinaan Teritorial diselenggarakan untuk mencapai 4 sasaran pokok yaitu terwujudnya Ruang Juang, Alat Juang, dan Kondisi Juang yang tangguh, serta mantapnya kemanunggalan TNI-Rakyat. **Terwujudnya ruang juang** yang tangguh dapat dimaknai sebagai terwujudnya wilayah pertahanan **aspek darat** yang siap sebagai mandala perang atau mandala operasi, dan mendukung baik kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan pertempuran di darat. **Terwujudnya alat juang** yang tangguh memiliki pengertian tersedianya komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terorganisir secara nyata dengan

segenap perangkatnya yang siap digunakan untuk kekuatan pengganda TNI AD untuk memenangkan pertempuran di darat. Sedangkan **terwujudnya kondisi juang** yang tangguh artinya terciptanya kondisi dinamis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sasaran keempat **terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat yang tangguh** yaitu terciptanya ikatan yang kokoh dan kuat serta bersatu padunya TNI rakyat, baik secara fisik maupun nonfisik.

Keempat sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Binter TNI AD tersebut tentu saja tidak akan dapat dicapai tanpa disertai dengan upaya-upaya nyata untuk mewujudkannya. Secara teoretis TNI AD telah mengeluarkan Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial yang secara praktis mengatur upaya-upaya untuk mencapai sasaran Pembinaan Teritorial yang telah ditetapkan.

Khusus terkait **Ruang juang** yang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan aspek geografi, yang meliputi bidang sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan segenap potensi sumber kekayaan alam dibina menjadi kekuatan geografi, dalam wujud ruang juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan untuk kepentingan pertahanan. Ruang juang ini dapat dijadikan sebagai ruang manuver satuan dan medan pertahanan untuk mendukung strategi pertahanan yang diwujudkan dalam klasifikasi daerah dalam bentuk daerah tempur, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan. Disamping berfungsi untuk manuver satuan, ruang juang ini juga berfungsi sebagai sarana persediaan logistik wilayah untuk mendukung strategi pertahanan. Bentuk kegiatan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ruang juang adalah sebagai berikut :

Untuk kepentingan manuver satuan perlu dilaksanakan upaya pengumpulan data

Tata Ruang Pertahanan Darat (RUTR Wilhanrat), analisa terhadap potensi wilayah maupun potensi pertahanan, koordinasi kepada Pemda dan Instansi terkait untuk *mensinkronkan* RUTR Wilhan dengan RTRW, serta menyiapkan klasifikasi daerah tempur, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan.

Disamping itu pembangunan yang ada perlu ditransformasi untuk mewadahi kepentingan pertahanan jika negara dalam kondisi perang, seperti jalan-jalan yang ada dapat dimanfaatkan sebagai jalan pendekat dan sarana prasarana lain seperti lapangan terbang, sumber air, Telkom dan sebagainya dapat digunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan. Upaya paling praktis yang dapat dilakukan seluruh prajurit pada semua strata adalah Bhakti TNI melalui TMMD, Pekan Bhakti TNI dan Karya Bhakti dengan membangun, membuka jalan baru, jembatan, sarana komunikasi dan lain-lain dalam tata ruang wilayah pertahanan darat.

Untuk kepentingan logistik wilayah dalam bentuk cadangan materiil strategis Pembinaan Teritorial perlu dilakukan dengan cara melaksanakan pengumpulan dan inventarisasi data tentang potensi SDA dan SDB serta sarana prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, maupun melaksanakan koordinasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi SDA dan SDB untuk kepentingan pertahanan negara.

TNI AD juga dapat membantu pemerintah mentransformasikan potensi SDA dan SDB dari bentuk sumber daya flora dan fauna, bahan tambang serta sumber-sumber energi yang memiliki nilai strategis menjadi cadangan materiil strategis dalam rangka mendukung logistik wilayah dalam bentuk logistik tempur, energi, pelumas, suku cadang dan bahan baku serta fasilitas pendukung lainnya. Bidang lain yang dapat dilakukan berkaitan dengan perbantuan kepada pemerintah adalah melestarikan sumber daya alam yang ada agar terjaga pemanfaatannya untuk dapat digunakan jangka Panjang melalui kegiatan inventarisasi,

pendataan dan pengamanan secara terpadu, melaksanakan diversifikasi dan pengembangan sumber daya alam yang ada agar tidak tergantung pada salah satu komoditi tertentu, serta mentransformasikan sarana dan prasarana menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung, dalam bentuk sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, depot logistik, migas dan distribusinya, kesehatan, listrik perbengkelan dan lain-lain.

Sebagai kegiatan riil yang melibatkan seluruh prajurit, TNI AD dapat melaksanakan kegiatan Bhakti TNI antara lain berupa penghijauan, pemanfaatan lahan tidur, dan lain-lain. Dalam proses untuk mewujudkan ruang juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara, yang dilakukan satuan TNI AD sifatnya membantu pemerintah dengan cara berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait antara lain Pemda, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan lain-lain.

Alat juang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan aspek demografi yang dibina menjadi kekuatan demografi dalam wujud alat juang yang tangguh dan memiliki daya tangkal kewilayahan untuk kepentingan pertahanan negara. Pembinaan terhadap potensi ini adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kekuatan rakyat yang tergabung sebagai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang pengabdianya di sesuaikan dengan profesi. Bentuk kegiatan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan alat juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara adalah berupa kegiatan fisik dan nonfisik.

Kegiatan-kegiatan fisik dapat dilakukan antara lain dengan menjalin kerja sama dengan Pemda dan pihak swasta untuk melatih materi PBB dan Jasmani saat ada program kegiatan Pemda seperti kursus pimpinan tingkat III dan tingkat IV serta melatih PBB saat penyegaran disiplin yang diselenggarakan oleh pihak swasta (perusahaan-perusahaan) terhadap karyawannya; memberikan/mengisi pelajaran

praktek PBB dan tata upacara di sekolah-sekolah; bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) secara bergantian di sekolah-sekolah dengan unsur Muspida/Muspika; mengisi / memberikan pengajaran PBB, tata upacara, praktek tali temali kepada Pramuka dan lain-lain; serta melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, Pramuka dalam mengikuti upacara-upacara kebesaran seperti Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan, Hari Kesaktian Pancasila, dan lain-lain.

Sementara itu kegiatan nonfisik dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan dengan materi yang berkaitan dengan bela negara seperti kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan lain-lain. Instansi terkait yang terlibat dalam mewujudkan alat juang tersebut antara lain adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemendagri, Pemda, Dinas Diknas, Depnakertrans dan lain-lain.

Kondisi juang merupakan perwujudan dari hasil pembinaan aspek kondisi sosial menjadi kekuatan pertahanan dalam wujud kondisi juang yang tangguh, sehingga memiliki daya tangkal kewilayahan yang kuat dan mampu mendukung kepentingan pertahanan negara. Aspek kondisi juang tersebut merupakan aspek pertahanan nasional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dalam bidang ideologi, kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh TNI AD antara lain memberikan penyuluhan secara terpadu untuk menanamkan keyakinan masyarakat tentang Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; mewaspadaikan terhadap gerakan ekstrim dan radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan eks G. 30 S/PKI dan golongan radikal lainnya; serta melakukan penyuluhan secara terpadu tentang bahaya laten komunisme, fundamentalis, teroris dan paham radikal lainnya.

Dalam bidang politik, kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa kegiatan menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga

negara; mendorong masyarakat agar selalu mematuhi ketentuan hukum dan kehidupan sehari-hari; serta mendorong masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pada sektor ekonomi, upaya-upaya atau kegiatan TNI AD dilakukan dalam bentuk persuasif serta edukatif seperti menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bersifat konsumtif; membantu pemerintah dalam meningkatkan intensifikasi pertanian dan perkebunan, perternakan dan perikanan yang dilaksanakan secara terpadu dan pemberdayaan di sektor lainnya; serta memberi penyuluhan secara terpadu tentang perkoperasian dan UKM kepada masyarakat.

Dalam bidang sosial budaya TNI AD dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam hidup beragama; melakukan penyuluhan-penyuluhan, penerangan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kesadaran hukum; memberikan penyuluhan kebersihan dan kesehatan lingkungan; menggalakan kegiatan olahraga dan melakukan olah raga bersama masyarakat; serta menumbuhkembangkan berbagai bentuk kesenian, budaya dan adat istiadat di lingkungan masyarakat.

Berkait dengan fungsi utamanya yaitu bidang pertahanan dan keamanan, TNI AD dapat mengajak masyarakat untuk membudayakan wajib lapor setiap ada perkembangan situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat; mendorong masyarakat untuk mengikuti penataran bela negara yang telah diprogramkan oleh pemerintah; menggalakan kegiatan Poskamling di lingkungan masyarakat. Dalam proses perwujudan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara perlu koordinasi dan melibatkan instansi lain yang terkait, antara lain Pemda, DPRD, Kesbang Linmas, Departemen Agama, Dinas Kesehatan, Depdiknas, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kesenian, Unsur TNI dan Polri yang ada di daerah dan lain-lain.

Sasaran paling krusial dan pragmatis yang

ingin dicapai oleh TNI melalui kegiatan Pembinaan Teritorial adalah **mewujudkan Kemanunggalan TNI - Rakyat**. Peranan rakyat sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalam aspek penyelenggaraan pertahanan negara. Bagi Indonesia peran aktif rakyat dalam bentuk Kemanunggalan TNI - Rakyat sangat dibutuhkan dalam sistem pertahanan negara. Sejarah telah membuktikan kesuksesannya pada saat perjuangan fisik melawan dan mengusir penjajah serta memadamkan berbagai pemberontakan yang terjadi di dalam negeri. Mengacu dari pengalaman sejarah tersebut maka strategi pertahanan yang diterapkan adalah sistem pertahanan yang bersifat **semesta** (Sishanta). Berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dalam Sishanta tersebut diwujudkan dalam bentuk **Kemanunggalan TNI - Rakyat**, yang merupakan rohnya TNI AD dan memiliki **kekuatan yang sangat ampuh** dalam sistem pertahanan negara di Indonesia.

Bentuk kegiatan untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara antara lain melakukan kegiatan Bhakti TNI berupa Karya Bhakti dan Pekan Bhakti TNI dengan sasaran-sasaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat; melakukan kegiatan Bhakti Sosial seperti, pemberian bantuan kemanusiaan, pengobatan massal dan melakukan silaturahmi melalui kunjungan-kunjungan; serta melakukan kegiatan bersama masyarakat, seperti olahraga bersama, kegiatan keagamaan, kesenian, acara adat dan lain-lain, baik perorangan maupun hubungan satuan.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas selalu disampaikan kepada masyarakat melalui Komunikasi Sosial yang baik tentang materi-materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, pentingnya persatuan dan kesatuan dan lain-lain.

Korelasi Binter dengan penciptaan daya tangkal pertahanan negara

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara yuridis Pembinaan Teritorial

adalah kebijakan manajemen atau cara atau metode yang ditempuh TNI AD dalam mewujudkan tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai amanah konstitusi dalam rangka mewujudkan kesiapan pertahanan negara di darat. Mengingat masih sangat terbatasnya kemampuan anggaran Pertahanan Negara untuk membangun kekuatan militer yang tangguh dan disegani, maka Binter merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mempersiapkan komponen pertahanan negara sehingga akan terwujud sistem pertahanan semesta yang mampu menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap integritas dan kedaulatan NKRI, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional.³

Untuk menghadapi ancaman yang bersifat konvensional, kita juga menjalankan Pertahanan Konvensional, yaitu pertahanan yang disiapkan untuk menghadapi ancaman yang bersifat penggunaan kekerasan militer secara terbuka. Indonesia harus sejauh mungkin mencegah pihak Agresor memasuki wilayah nasional Indonesia. Sebab makin banyak bagian-bagian Indonesia terlibat dalam satu perang terbuka, makin besar kemungkinan terjadinya kehancuran dan kematian pada wilayah dan rakyat Indonesia. Berbagai hasil pembangunan yang berharga dan telah kita wujudkan dengan penuh jerih payah serta biaya banyak dapat hancur karenanya. Rakyat dapat mengalami kematian yang tidak sedikit, seperti yang sudah kita lihat pada bangsa lain yang diserang dengan kekerasan senjata.

Di samping melakukan berbagai gerakan militer Agresor pasti juga mengusahakan menggerogoti kekuatan masyarakat Indonesia dengan melakukan berbagai macam propaganda dan tindakan politik serta psikologis lainnya. Mereka akan menggerakkan insurjen-insurjen yang sebelumnya disiapkan oleh intelijen mereka dan orang Indonesia yang dapat mereka jadikan agen mereka. Untuk menghadapi itu peran **Komando Kewilayahan** yang memiliki tugas pokok melaksanakan Pembinaan Teritorial adalah sangat penting.

3. Penjelasan tentang ancaman konvensional dan non konvensional ini dapat dibaca lebih lengkap dalam tulisan Sayidiman Suryohadiprojo,

“Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Untuk Menyiapkan Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung Sishankamrata Menghadapi Abad 21”

Dalam Pertahanan Konvensional peran Rakyat adalah menjaga semangat dan daya perlawanan yang tidak mengenal menyerah. Mengingat pentingnya semangat dan daya perlawanan yang menjadi kunci pertahanan bangsa, maka Agresor akan melakukan berbagai aksi yang melemahkan daya perlawanan itu agar Rakyat menjadi lemah dan mendesak Pemerintah untuk tunduk kepada kehendak Agresor.

Pertahanan terhadap ancaman Non-Konvensional terutama terletak dalam kemampuan Indonesia membangun **Daya Tangkal**, yaitu membentuk persepsi pada semua pihak bahwa mengganggu Indonesia justru akan lebih merugikan pengganggu. Daya Tangkal ini, selain terwujud dari kondisi TNI, Polri dan Aparat Intelijen dengan kemampuan tinggi dalam menjalankan segenap tugasnya, sangat tergantung pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (*good governance*) yang berhasil menciptakan kesejahteraan makin tinggi pada semua rakyat dan menimbulkan keadilan dan ketenteraman bagi seluruh bangsa.

Kondisi harmonis dan gotong-royong dalam masyarakat menjunjung tinggi harga dan kebebasan perorangan dalam rangka tertib dan damai masyarakat. Dengan begitu Pluralisme atau Kemajemukan bangsa Indonesia di satu pihak dan sikap Kebersamaan dan Gotong-Royong di pihak lain akan dapat mencegah berkembangnya pertentangan antar-golongan, baik golongan agama, etnik maupun suku bangsa. Dengan begitu individualisme dan liberalisme yang membawa paham kebebasan mutlak dapat ditolak tanpa meniadakan perkembangan prakarsa individu yang penting bagi perkembangan masyarakat.

Daya Tangkal itu harus didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap segala usaha yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu fungsi **Kontra-Intelijen** yang dilakukan aparat Intel sangat penting. Juga peran Polri dalam mengawasi keadaan masyarakat. Di samping itu adalah amat penting peran dari Satuan Kewilayahan TNI AD dalam memelihara hubungan yang erat antara TNI dengan Rakyat. Peran ini sangat didukung

oleh adanya **Komponen Cadangan** yang sebagai warga negara sipil hidup dalam berbagai bagian masyarakat. Demikian pula **Komponen Pendukung** yang memperkuat peran satuan kewilayahan TNI AD.

Selain kondisi dalam negeri yang stabil dan harmonis Indonesia juga menjalankan politik luar negeri dan diplomasi yang membuat banyak sahabat di antara bangsa-bangsa lain serta menjalankan peran yang aktif dan produktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta berbagai lembaga internasional dan regional lainnya. Dengan begitu Indonesia dapat menarik simpati banyak bangsa lain kalau diganggu oleh pihak lain. Indonesia terutama berkepentingan agar ASEAN menjadi organisasi kuat yang mendukung kepentingan Indonesia.

Masyarakat yang makin sejahtera hidupnya dan hidup berdampingan secara harmonis serta diliputi rasa keadilan, dengan dijaga oleh aparat Polri, TNI dan Intel yang tinggi kemampuannya, akan sukar dikalahkan Agresor dengan Serangan Non-Konvensional. Sebab masyarakat demikian akan senang dan bahkan bangga serta percaya kepada negara dan bangsanya sendiri dan selalu akan membelanya kalau diganggu dan diserang. Mungkin saja Agresor dapat mempengaruhi sekelompok kecil orang Indonesia, tetapi kelompok kecil ini akan sukar meluaskan pengaruhnya yang diperlukan untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah.

Namun demikian, Pemerintah harus selalu mengawasi agar penetrasi melalui budaya dan informasi tidak dapat merongrong keadaan dalam negeri. Mungkin sekali penetrasi ini merembes secara perlahan, tetapi bagaikan tetesan air yang terus-menerus dapat melobangi batu yang keras, demikian pula infiltrasi budaya dan informasi ini harus sangat diwaspadai. Harus benar-benar dijaga bahwa Agresor tidak berhasil membuat "*mole*" di tubuh bangsa Indonesia, khususnya dalam pimpinan politik, TNI dan aparat Intel.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat dibuat suatu kesimpulan singkat bahwa meskipun Pembinaan Teritorial telah

mengalami redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi sesuai dengan paradigma baru TNI pasca bergulirnya era reformasi, namun relevansi Pembinaan Teritorial sebagai salah satu solusi untuk menciptakan daya tangkal Pertahanan Negara masih sangat tinggi. Relevansi tersebut semakin dapat dirasakan manakala kita mengingat kembali berbagai peristiwa yang menunjukkan betapa banyak negara tetangga yang jauh lebih kecil, tetapi memandang rendah kekuatan pertahanan Indonesia dan senantiasa memprovokasi konflik dengan melakukan berbagai pelanggaran wilayah maupun klaim sepihak atas wilayah-wilayah terluar NKRI.

Dengan demikian, Pembinaan Teritorial sebagai salah satu Fungsi Utama TNI AD hendaknya tetap dapat dipertahankan demi menjaga tetap tegaknya kedaulatan NKRI terhadap berbagai ancaman baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Tentu saja Pembinaan Teritorial ini harus dilaksanakan secara komprehensif dan didukung oleh semua pihak karena sasaran akhirnya bukan sekadar terjaganya kepentingan TNI, melainkan terjaganya NKRI.

Referensi:

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
4. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia 2008.
5. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia 2008.
6. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.
7. Keputusan Kasad Nomor Kep 01/2/2007 tentang Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

8. Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial.

9. Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, "Route Perjuangan Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman." CV. AMI GLOBAL MEDIA, Jakarta 2008.

10. Sayidiman Suryohadiprojo, ""Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Untuk Menyiapkan Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung Sishankamrata Menghadapi Abad 21"

11. Ceramah Aster Kasad kepada Pasis Dikreg XLVI Seskoad TA. 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyelenggaraan Binter pasca UU No 34 Th 2004 serta masalah aktual yang dihadapi.



Kolonel Inf Totok Sulistyono, S.H., M.M. adalah abituren Akmil 1991 dan lulusan Seskoad Tahun 2012, saat ini sedang melaksanakan Dik PPRA LXII Lemhannas RI.

ANALISIS PERANG TERHADAP TERORIS DIHADAPKAN STRATEGI BENTUK PERANG DI MASA DEPAN



Mayor Inf Zulfani, S.Sos.

Pendahuluan.

Perkembangan global masa kini memaksa politik strategi pertahanan dan keamanan negara Indonesia disesuaikan tingkatawasannya mencakup regional, karena dunia sudah tanpa batas (Konice Kohmae). Dengan demikian, politik strategi pertahanan Negara Indonesia harus berupaya menciptakan *frontier* di luar batas negara dengan maksud untuk memperbesar ruang pertahanan dan keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Politik strategi pertahanan RI adalah jabaran dari geopolitik pada aspek militer, karena itu mengandung aspek-aspek konsepsi ruang, konsepsi *frontier*, konsepsi kekuatan-kekuatan dan konsepsi penciptaan rasa aman dan keamanan bagi rakyat. Atau dengan kata lain Politik Strategi Pertahanan RI dapat didefinisikan sebagai perlawanan rakyat semesta yang disesuaikan dengan perkembangan situasi global. Dengan politik pertahanan rakyat semesta dikaitkan dengan kondisi dan konfigurasi geografis ruang negara, maka strategi pertahanan yang digelar untuk mewujudkan rasa aman bagi rakyat adalah "*stability in Depth*" atau stabilitas berlapis. Karena ancaman sudah

menjadi virtual, mungkin datangnya tiba-tiba, kesiagaan harus selalu ada dan arsitektur stabilitas yang belapis-lapis.¹

Pada pemerintah terdahulu (Orde Baru) di Indonesia dapat menyikapi persoalan terorisme dengan mengambil berbagai tindakan pencegahan dan penanggulangan, misalnya melakukan operasi militer yang bersifat rahasia atau terbuka yang melingkupi operasi intelijen, perundingan-perundingan, atau kombinasi dari hal tersebut. Langkah-langkah nasional dalam memerangi terorisme internasional dan sebagai upaya penangkalan kegiatan terorisme di dalam negeri, pemerintah memberlakukan undang-undang anti terorisme.²

Pembahasan

Dihadapkan fenomena dimensi perang yang telah berubah wujud dengan bentuk tidak nyata (tanpa bentuk), salah satu contohnya adalah serangan kelompok yang mengatasnamakan agama dengan label Teroris, merupakan ancaman nyata yang saat ini harus dihadapi oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dihadapkan hal tersebut maka penulis mencoba menganalisis bentuk perang dan strategi perang yang harus diambil oleh pimpinan TNI dalam menghadapinya.

1 Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Agustus 2005.
Tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 09.00 Wib.

2 Lebih lanjut mengenai hal ini, lihat tulisan Donny Gahral Adian dalam Analisis CSIS edisi Terorisme dan Keamanan Manusia tahun 2003 No. 1. hal. 78-88. Tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 09.00 Wib.

Kaledoskop aksi teror di dunia antara lain, **Serangan Bom Bunuh Diri di Gereja Katolik Filipina** yang menewaskan 20 orang, pada pagi hari 27 Januari 2019, dua bom bunuh diri tersebut menghantam gereja Katolik, Katedral *Our Lady of Mount Carmel* di Jolo, Filipina. Sebanyak 20 orang, dengan 14 di antaranya merupakan warga sipil, tewas dalam serangan tersebut. Adapun 102 lainnya terluka. Menteri Dalam Negeri Eduardo Ano menyatakan, pelaku bom bunuh diri disebut merupakan pasangan suami istri asal Indonesia. Kemudian, **penembakan massal jemaah di dua masjid di Christchurch (Selandia Baru)** yang tengah melaksanakan Shalat Jumat. Serangan yang terjadi pada 15 Maret 2019 itu menargetkan Masjid Al Noor yang berada di pinggiran Riccarton, dan Linwood. Sebanyak 51 orang tewas dalam insiden tersebut, 42 korban di antaranya berada di Al Noor, 7 di Linwood, dan 2 di Rumah Sakit Christchurch. Berikutnya, **penembakan Massal di El Paso, Texas, AS** yang menewaskan 22 warga yang tengah berbelanja di Walmart El Paso, Texas, pada 3 Agustus 2019. Pemuda 21 tahun bernama Patrick Crusius dari Allen, memberondongkan senapannya ke arah pengunjung yang sedang berbelanja. Crusius ditangkap tak lama setelah menyerang Walmart. Polisi menerangkan dia sempat merilis manifesto tindakannya. Pemuda itu menyebut dia terinspirasi dari penembakan massal di masjid Selandia Baru, dan mengkritik adanya "pekerja asing" di AS (Orang Meksiko).³

Berdasarkan beberapa fakta di atas, penulis memandang hal ini telah mewakili pemahaman terkait aksi tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan lebih dikenal dengan istilah Aksi Terorisme. Adapun penyebab terjadinya hal tersebut karena masih adanya kebijakan-kebijakan politik nasional yang memperlakukan secara tidak adil kelompok tertentu dan kurangnya pemahaman individu

atau kelompok dalam menyikapi suatu permasalahan, sehingga berdasarkan definisi di atas, maka penulis mencoba mem-*partisi* komponen pembentuk pelaku teror yang menjadi penggerak aksi-aksi terorisme ini menjadi beberapa variabel sebagai berikut, **Pemahaman *antecedent* pelaku Teror, Tujuan, dan Motivasi pelaku Teror melakukan aksi tersebut, dan cara kelompok tersebut melakukan aksi Terornya.**

Dihadapkan dengan variabel terkait tentang pemahaman antecedent dari para terduga pelaku aksi teror maka penulis menganalisis bahwa individu atau kelompok yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung berasal dari seluruh lapisan. Dilihat dari tingkat ekonomi, pelaku tidak hanya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga kelompok ekonomi menengah ke atas. Kemudian dihadapkan dengan Gender, pelaku aksi tersebut tidak hanya berasal dari golongan pria, tetapi juga berasal dari golongan wanita. Selanjutnya dihadapkan dengan tingkat pendidikan, terduga pelaku aksi teror tersebut juga tidak hanya berasal dari kalangan yang diklasifikasikan tidak berpendidikan, tetapi juga berasal dari golongan yang diklasifikasikan berpendidikan. Berdasarkan analisis data dan fakta di atas menunjukkan bahwa pelaku teror merupakan individu atau kelompok berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap oleh para pelaku teror tidak adil terhadap individu ataupun kelompok tertentu.

Dihadapkan dengan tujuan, motivasi dan cara kelompok tersebut melakukan aksi teror, dapat disimpulkan bahwa pelaku teror selalu mengatasnamakan kelompok atau aliran, dengan tujuan untuk menunjukkan kepada pihak tertentu atau pihak berkuasa, baik yang dapat diartikan sebagai kelompok mayoritas, pemerintah atau kelompok pimpinan usaha. Pelaku teror merasa mendapat perlakuan yang tidak adil atau menginginkan kompensasi

3 <https://internasional.kompas.com/read/2019/12/30/21451221/kaleidoskop-5-aksi-teror-yang-terjadi-di-dunia-sepanjang-2019?page=all>. Tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 09.10 Wib.

materi, sehingga pelaku melakukan aksinya baik secara tidak langsung melalui ancaman-ancaman baik lisan atau tertulis di dunia Maya, media cetak atau elektronik, maupun melalui tindakan fisik seperti penembakan, pengeboman, dan lain-lain bentuk tindak kekerasan. Sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyebutkan bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang didefinisikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.⁴

Sedangkan terkait dengan motivasi pelaku teror dihadapkan dengan beberapa contoh kasus, maka dalam melaksanakan aksinya pelaku teror mengemban beberapa misi, mulai dari misi pribadi sampai dengan misi yang mengatasnamakan kelompok. Pertama, analisis terhadap misi pribadi yang dibawa oleh para pelaku teror disebabkan oleh rasa ketidakadilan yang dialami oleh individu pelaku, sehingga pelaku mengambil langkah sendiri dalam mencari keadilan meskipun rasa keadilan tersebut tidak sepenuhnya benar bahkan cenderung salah. Selain itu, adanya keinginan untuk menunjukkan eksistensi keberadaan individu pelaku dengan tujuan untuk mendapat pengakuan publik. Adanya kesalahan dalam memahami perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang, sehingga bias dari kesalahan dalam memahami situasi tersebut berujung pada langkah negatif yang diambil oleh para pelaku.

Kedua, analisis terhadap misi yang mengatasnamakan kelompok disebabkan adanya perbedaan pandangan kelompok terhadap satu situasi, sehingga individu

pelaku aksi teror yang melakukan kegiatannya lebih cenderung membawa muatan kelompok. Hal tersebut terjadi karena pandangan dari suatu kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi doktrin pada diri individu anggota kelompok, sehingga dominasi dari tindakan yang dilakukan oleh individu pelaku sebagian besar dipengaruhi oleh doktrin kelompok. Adapun tujuan dari eksistensi pelaku yang mengatasnamakan kelompok adalah untuk menunjukkan kebenaran kelompoknya dalam menilai sesuatu permasalahan, meskipun pada kenyataannya pandangan kelompok tersebut cenderung memiliki pemahaman yang salah.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ancaman perang terhadap teroris berskala besar merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia dihadapkan dengan anteceden para pelaku, tujuan, motivasi serta cara kelompok tersebut melakukan aksi terornya, sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut, Pertama menciptakan strategi perang yang menitikberatkan pada operasi perang pikiran dengan metode Brain Wash skala besar. Adapun secara teknis metode tersebut dilakukan dengan cara memasukkan materi-materi yang isinya berupa penjelasan-penjelasan terkait pemahaman ideologi dan pandangan hidup bangsa karena materi-materi tersebut saat ini sudah tidak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan baik dari tingkat dasar, menengah, ataupun lanjutan serta melaksanakan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait arti dari teror, teroris, dan aksi terorisme. Dengan tujuan agar terdapat pemahaman yang sama dalam diri setiap anak bangsa terkait arti dari kata, kegiatan serta hakikat ancaman yang akan ditimbulkan terorisme. Kedua, melakukan kampanye berbisik melalui media sosial dengan materi yang sama seperti materi yang

4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



Image:inilah.com

diberikan saat kegiatan nyata di lapangan. Saran ini diperlukan sebagai strategi perang masa depan dihadapkan dengan kemungkinan berubahnya bentuk perang di masa yang akan datang atau lebih dikenal dengan perang generasi ke-5, yaitu perang yang terdiri dari perang informasi dan propaganda, perang ekonomi, hingga serangan siber (perang tanpa bentuk).⁵

Demikian tulisan tentang analisis perang terhadap teroris dihadapkan strategi bentuk perang di masa depan, sebagai salah satu sumbang pikiran dari penulis dalam menganalisis bentuk perang yang terjadi saat ini dan kemungkinan bentuk perang yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Mayor Inf Zulfani, S.Sos. Adalah abituren Akmil 2006 dan lulusan Dikreg LIX Seskoad saat ini menjabat sebagai Wadanyonif 410/Alu goro

5 <https://www.dara.co.id/dunia-memasuki-perang-generasi-kelima.html>. Tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 07.50 Wib



PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) GUNA MENANGANI TERORISME DAN RADIKALISME

Kolonel Inf Suwanto, S.I.P.

Pendahuluan.

Peristiwa runtuhnya menara kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 oleh kelompok Al-Qaeda Osama Bin Laden yang berafiliasi kuat dengan Jamaah Islamiah di Asia Tenggara dan aksi kelompok ISIS, merupakan aksi Teroris yang cukup fenomenal. Hingga Juli 2016 tercatat sebanyak 143 aksi teror yang menelan korban meninggal sebanyak 2.043 jiwa dan hingga kini jumlah korbannya terus bertambah. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai momentum untuk memerangi aksi terorisme dunia. Selain itu, adanya Fenomena **Arab Spring** merupakan bukti menguatnya **Islamophobia**, yang dimanfaatkan/diboncengi penyusup pengungsi Suriah ke benua Eropa hingga ke Indonesia.

Konsep radikalisme dan terorisme pada dasarnya menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan dalam suatu aliran politik tertentu dengan ciri sebagai berikut : 1) Menolak modernisasi dan sekularisme, 2) Menolak budaya dunia barat yang merusak tatanan islam, 3) Pancasila dianggap bertentangan dengan ajaran islam, sehingga pemerintahan Indonesia dianggap *toghut* dan kafir. Sedangkan penyebab radikalisme adalah 1) Adanya ketidakadilan dan tertekan politik serta kesenjangan ekonomi (kemiskinan), namun di kawasan timur tengah, Afrika Utara dan Negara barat justru banyak dari kelompok ekonomi menengah karena semangat juang dan syahid yang ditawarkan

olehnya, 2) Pengaruh budaya setempat sebagai kebiasaan kekerasan dan radikalisme, 3) Lenyapnya ikatan paguyuban dan maraknya masyarakat atomistic, 4) Berkurangnya ketergantungan otoritas tradisional akibat berkembangnya teknologi informasi dan media sosial mengakibatkan tafsir agama yang beragam, dan 5) Adanya keberagaman etnis, agama dan kultur.

Istilah terorisme berarti membuat gemetar/menggetarkan (Latin) / penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan politik (KBBI). Definisi terorisme tersebut juga disampaikan oleh kalangan akademisi, seperti Smelser dan Mitchell, Schmid, Lacquer, Edwar Herman yang dikutip oleh Maulana. Kemudian OKI dari kacamata hukum 1999 mendefinisikan terorisme, yaitu, **Pertama**, Setiap tindakan kekerasan atau ancaman dengan motif atau niat yang dilakukan untuk melaksanakan rencana kriminal secara individu ataupun kolektif dengan tujuan meneror orang atau mengancam untuk menyakiti mereka atau membahayakan hidup, kehormatan, kebebasan, keamanan atau hak mereka/mengekspos lingkungan/fasilitas atau property publik/menduduki, merampasnya, membahayakan sumber daya nasional/fasilitas internasional atau mengancam stabilitas, integritas wilayah, kesatuan politik, kedaulatan dari negara negara yang merdeka. **Kedua**,

Setiap kejahatan yang dilaksanakan, dimulai atau diikuti sertakan dalam mewujudkan tujuan teroris di salah satu negara pihak atau terhadap warga negaranya, asset atau kepentingan atau fasilitas asing dan warga negara yang tinggal di wilayahnya yang dapat dihukum oleh hukum internal negara tersebut.

Selanjutnya, OKI menegaskan bahwa perjuangan masyarakat termasuk perjuangan bersenjata yang melawan pendudukan asing, agresi, kolonialisme dan hegemoni yang bertujuan untuk pembebasan dan penentuan nasib sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional tidak akan dianggap sebagai kejahatan teroris, contoh Hamas di Palestina. Kemudian juga definisi teroris dalam konteks hukum positif Indonesia yaitu UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Faktor penyebab teroris menurut Shmuel Bar yang dikutip oleh Zulfi Mubarak di dunia muslim yaitu : a. Politik berkepanjangan Israel Arab dan campur tangan politik dan militer USA di negara-negara muslim, b. Budaya, yakni perlawanan terhadap kolonialisme budaya barat, c. Sebab Sosial karena kemiskinan dan alinasi.

Sedangkan, kaitan antara Radikalisme dan Terorisme menurut AS Hikam dan Ahmad Syafi'i Mufid adalah radikalisme merupakan salah satu penyebab aksi terorisme, sehingga peran OKI tidak hanya penanganan terorisme saja, tetapi juga pada pencegahan menyebarnya radikalisme dunia Islam yang bersumber dari aspek politik berupa agresi dan kolonisasi wilayah umat Islam/kepemimpinan yang tidak Islami, kesenjangan ekonomi si kaya dan si miskin serta aspek budaya yang sulit menerima perbedaan.

Pembahasan.

Sebelum membahas tentang peran OKI dalam penanganan terorisme dan radikalisme terlebih dulu akan disampaikan perkembangan strategis terkait isu radikalisme dan terorisme di sejumlah kawasan, yakni Kawasan Asia, Kawasan Eropa dan Kawasan Afrika.

1. Perkembangan Strategis Isu Radikalisme dan Terorisme Kawasan Asia.

Kelompok Teroris ISIS, Taliban dan Al-Qaeda hingga saat ini masih bertahan dan berpengaruh di kawasan Asia. Pada April 2016 menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (ketika itu) terdapat sekitar 483 WNI yang bergabung dengan ISIS. Pergerakan di wilayah Asia Tengah saat peristiwa Aleppo telah ditekan, namun belum berhasil ditangani, dimana pada Januari 2015, ISIS mengumumkan pendudukan provinsi Khorasan dari wilayah Afghanistan dan Pakistan serta Irak, Suriah, Libya, Mesir (Sinai), Gaza, Arab Saudi, Yaman, Aljazair, Nigeria, Kaukasus Utara, dan bahkan Eropa. Namun demikian Taliban tidak mendukungnya, agar ISIS keluar dari Afghanistan.

Serangan terbesar ISIS di Asia adalah yang terjadi di Qaim Irak pada 9 April 2015 dengan memenggal kepala 300 orang warga sipil. Sepanjang tahun 2016 telah terjadi 20 kali insiden serangan ISIS, yakni : di Turki 2 kali yaitu serangan bom dan bom bunuh diri, di Thamrin Jakarta Pusat - Indonesia (peledakan dan serangan bersenjata), di Yaman 2 kali (bom mobil dan serangan bersenjata), di Suriah 3 kali, di Bangladesh 6 kali, Kazakhstan 2 kali, Malaysia 1 kali, Afghanistan 1 kali dan Pakistan 1 kali.

Pada 11 September 2001 kelompok Al-Qaeda menyerang WTC sebagai pemicu bangkitnya gerakan radikal dan teror dunia yang berafiliasi dengan kelompok Al-Shabab (Afrika Barat), Front Al-Nusrah (Suriah), Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (Yaman dan Arab Saudi), Al-Qaeda in Islamic Maghreb (Aljazair), Brigade Abdulla Azzam (Lebanon), Al-Qaeda in the Indian Sub Continent (Pakistan, India, Srilanka, Myanmar dan Bangladesh) dan di Indonesia Al-Qaeda berafiliasi dengan Jamaah Islamiah.

Pada tahun 1996 s.d 2001 kelompok Taliban berkuasa atas Afghanistan, dimana pada tahun 2015 telah melakukan apa I sebanyak 1.094 kali dan menewaskan 4.502 orang. Namun saat ini sudah melemah akibat krisis keuangan. Disisi lain masih ada kelompok teroris di apa la Asia, yaitu Macan Tamil (Srilanka) dan Abu Sayyaf (Filipina) sebagai teroris maritime dengan aksi penculikan dan penyanderaan apa lasing yang melintas di perairan Filipina seperti

penyanderaan dan penculikan kapal perusahaan batu bara di Banjarmasin tahun 2016.

2. Perkembangan Strategis Isu Radikalisme dan Terorisme Kawasan Eropa.

Di Kawasan Eropa, terjadi sejumlah aksi terorisme antara lain : penyerangan terhadap kantor berita Charlie pada 7 Januari 2015, penembakan polisi wanita dan beberapa pengunjung di swalayan Yahudi Hyper Cacher dari kelompok Al-Qaeda, pada 13 November 2015 serangan di kafe, restoran dan stadion olah raga dan malam perayaan hari nasional di Perancis dilakukan oleh ISIS. Selanjutnya sepanjang 2016 terdapat 9 aksi teror di Eropa, yaitu : di Perancis 4 kali, di Belgia 2 kali dan di Jerman 3 kali.

Sementara pada Oktober 2014 muncul kelompok radikal anti Muslim bernama Patriotische Europaer Gegen Die Islamisierung Des Abendlandes (PEGIDA) dengan tujuan menolak segala macam bentuk ancaman oleh ekstrimis Islam dengan aksi penyerangan kamp pemuda yang berkaitan dengan partai buruh Norwegia di Pulau Utoya pada 22 Juli 2012 dan sebelumnya aksi bom di Oslo.

3. Perkembangan Strategis Isu Radikalisme dan Terorisme Kawasan Afrika.

Di kawasan Afrika, pada tahun 2005 muncul kelompok Perompak Somalia karena kegagalan ekonomi dan politik pemerintahan Somalia. Pada tahun 2011 kelompok Perompak Somalia menyerang 237 kapal, menahan 11 kapal dan menyandera 216 orang dengan mendapatkan uang 2 juta dolar untuk setiap kapal, sehingga mengakibatkan terganggunya keamanan internasional. Melalui kerjasama antar negara kelompok ini berhasil ditekan dan berhenti untuk sementara waktu.

Selanjutnya pada tahun 2002 muncul kelompok Boko Haram sebagai kelompok Jihadis yang berpusat di Barat Daya Nigeria, dimana pada tahun 2014 menculik 200 orang siswi menengah di Chibok timur laut Nigeria untuk dijadikan korban kawin paksa. Dengan solidaritas Internasional melalui jargon “ Bring Back Our Girls” pemerintah Nigeria hanya mampu membebaskan 97 anak, sisanya tidak

diketahui keberadaan. Sejak 2002 s.d 2011 kelompok ini telah melakukan pembunuhan terhadap 6.742 orang dan pada tahun 2014 melakukan aksi bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 50 siswa serta pada Maret 2015 kelompok ini berafiliasi dengan ISIS dengan mengganti nama menjadi Islamic State West Africa Province.

Masih banyak kelompok radikal lainnya yang berafiliasi dengan ISIS, seperti : Al-Ghurabaa dan Al-Ansar Battalion di Aljazair, Islamic Youth Shura Council, Islamic State Libya dan Shura Council Of Shabab Al-Islam Darnah di Libya, Jamaat Ansar Bait Al Maqdis dan Jund Al-Khilafah di Mesir, Okba Ibnu Nafaa Battalion dan Jund Al-Khilafah In Tunisia di Tunisia, Al-Shabaab Jubba Region Cell Bashir Abu Nurman di Somalia. Kelompok -kelompok ini belum mampu dihalau pergerakannya baik oleh negaranya maupun kerjasama Negara negara Afrika dan Uni Afrika. Salah satunya yaitu dengan Indonesia melalui BNPT dan pada Agustus 2016 dibentuklah Unit Africa Command (AFRICOM) oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berpusat di Jerman.

Adapun respon Negara-negara Islam dalam menghadapi Isu Radikalisme dan Terorisme, yaitu dengan membentuk aliansi militer 34 negara Islam untuk memerangi terorisme yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan sekaligus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Abdul Aziz Al Saudi (saat melakukan kunjungan kenegaraan di istana raja Faizal Jeddah Kerajaan Arab Saudi), yaitu dengan membentuk sekutu militer yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk memerangi terorisme : Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Comoros, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria, Yamann dan 10 negara Islam lainnya termasuk Indonesia. Tujuan sekutu militer tersebut untuk menjalankan tugas melindungi negara dari kejahatan semua kelompok bersenjata dan organisasi teroris yang menyebabkan tindakan

pembunuhan dan korupsi di dunia yang dirancang untuk meneror orang-orang tak bersalah.

Peran dan Fungsi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah :

Pertama, Sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai masalah yang dihadapi umat islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar dan menduduki Masjid Al Aqsa di Yerusalem oleh Israel 21 Agustus 1969 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal mulai tahun 1971 s.d 2016. OKI merupakan organisasi International non militer dengan jumlah 57 negara Islam yang tersebar di 4 (empat) benua setelah organisasi PBB. Inti tujuan dan peran tersebut adalah untuk meningkatkan solidaritas Islam, mengkoordinasikan kerjasama, mendukung perdamaian dan keamanan serta melindungi tempat suci Islam dan membantu pembentukan Negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan peran menangkal terorisme dan gerakan radikalisme serta memberikan perhatian khusus terhadap situasi Palestina dan mendukung kemerdekaannya.

Kedua, Merupakan kerjasama, Rezim International, MOU dan lain-lain untuk menyelesaikan resolusi konflik Palestina-Israel, Sunni-Syah di Irak, Nuklir Iran, konflik Darfur (Sudan), Somalia dan diskriminasi muslim Thailand / Filipina, meredam gejala radikalisme islam yang semakin menguat terkait jaringan terorisme.

Selanjutnya, hasil-hasil KTT OKI yaitu : 1) KTT ke-10, diantaranya merestrukturisasi Sekretariat OKI (perampingan struktur, metodologi, kemampuan keuangan dan SDM, 2) KTT-11, menghasilkan Piagam OKI dengan mengangkat berbagai isu politik, keamanan Palestina, minoritas Muslim seperti di Kosovo, terorisme, ekonomi dan sosial budaya, 3) KTT-35, menghasilkan Piagam Baru OKI untuk mendukung proses revitalisasi OKI agar semakin efektif untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan global, 4) KTM OKI ke-36, membahas isu kerjasama politik, komunitas muslim di negara bukan anggota OKI, kemanusiaan, hukum, masalah-masalah umum dan keorganisasian, informasi, ekonomi, Ilpengtek, dakwah, sosial budaya,

administrasi dan keuangan, 5) KTM OKI-37, mengesahkan deklarasi Dushanbe terkait perdamaian di Timur Tengah, Afganistan, pengutukan agresi Armenia terhadap Azerbaijan, menyambut baik kesepakatan pertukaran bahan bakar nuklir oleh Iran, Turki, Brazil, terorisme, pelucutan senjata nuklir dan pemusnah masal, pengembangan SDM dan pendidikan, mendorong kelancaran barang dan jasa diantara Negara OKI dan dialog antar peradaban dan Islamofobia, 6) KTM OKI-40, berisi pernyataan sikap OKI atas berbagai isu dan resolusi sebagai komitmen global dunia muslim untuk meredam terorisme.

Analisis dan pembahasan terhadap isu Radikalisme dan Terorisme bagi Negara-negara Islam adalah ketika perang dingin berakhir isu radikalisme dan terorisme sudah semakin terlihat. Negara Irak yang dibantu Amerika melawan Iran yang dibantu Uni Soviet pada dekade 1970 dan 1980, namun pada 1990-an Irak justru menjadi musuh Amerika terutama pada perang Teluk II, dimana Amerika dan tentara koalisi menggempur pasukan Irak yang menginvasi Kuwait. Kelompok Al-Qaeda yang dulu alat Amerika dalam menghadang Uni Soviet di Afganistan, justru menjadi musuh Amerika sebagai kelompok teroris yang akhirnya menjadi kelompok bersenjata muslim untuk melakukan pengeboman terhadap sarana kepentingan Amerika dan Negara barat lainnya di Timur Tengah dengan puncaknya pada peristiwa runtuhnya WTC 11 September 2001. Hal ini muncul tindakan balas dendam pasukan koalisi NATO pimpinan Amerika untuk menyerang Afganistan pada Oktober 2001 dan Irak pada 2003 dengan alasan mereka melindungi Al-Qaeda. Ternyata agenda tersebut justru semakin menumbuhkan radikalisme dan terorisme di berbagai negara muslim untuk membantu Afganistan dan Irak sebagai wujud berjihad (Thogut).

Akibat pemberitaan media terkait peristiwa WTC yang berlebihan mengakibatkan Islam dituduh identik dengan terorisme dan muncul Islamophobia di Amerika, Eropa dan belahan bumi lainnya sehingga masyarakat muslim mendapat perlakuan diskriminatif oleh warga sipil dari negara tersebut, seperti pelarangan

penggunaan Burqa di Perancis dan Belgia, berbagai film Islam sebagai teroris dan kekerasan. Akhirnya dampak tersebut mengimbas ke Indonesia melalui munculnya Jamaah Islamiah dengan aksinya 8 kali semenjak 2000 s.d 2011. Kemudian pasca fenomena Arab Spring menjadi momentum kemunculan konflik internal antara pihak pemerintah dengan kelompok oposisi bersenjata (Libya, Yaman dan Suriah) yang akhirnya membangkitkan gerakan radikal karena sentiment agama, kesukuan, dan sektarian sebagai legitimasi alasan jihad/thogut (contoh, ISIS dipimpin Abu Bakar Al Baghdad, di Indonesia Jamaah Ansharut Tauhid Abu Bakar Baashir dan Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso dengan jumlah anggota 2000-an orang) yang diorganisir dengan Forum Aktifis Islam/Faksi yang dipimpin Muhammad Fachry.

Langkah OKI dalam menghadapi radikalisme dan terorisme yaitu secara kelembagaan OKI telah memiliki beberapa departemen yang terkait dengan penanganan radikalisme dan terorisme secara langsung maupun secara tidak langsung terkait dengan penyebab/pemicu radikalisme dan terorisme.

Pertama, Departemen urusan politik yang bertugas memberantas terorisme internasional dan mengkaji berbagai isu-isu politik internasional dan regional. **Kedua**, Departemen urusan budaya dengan membawahi urusan sosial dan keluarga yang bertugas menangani isu-isu kultural muslim, mengkaji dan menindaklanjuti tentang lintas keyakinan dan lintas budaya serta yang berkaitan dengan *United Nations Alliance Of Civilization (UNAOC)* dengan prioritas penanganan pada Islamophobia, pemeliharaan Al Qud dan perlindungan terhadap situs Islam di seluruh dunia.

Sedangkan peran OKI lainnya adalah : **Pertama**, melaksanakan resolusi 41/42-POL yaitu agar Sekretaris Jenderal OKI mengambil langkah-langkah untuk melarang hasutan terhadap segala bentuk terorisme, kekerasan, ekstrimisme terutama yang melalui media dan ruang siber. **Kedua**, Resolusi 42/42-POL yaitu untuk melawan situs-situs media sosial yang

disalahgunakan oleh teroris asing untuk menghasut dan meneror serta meminta pemberantasan ideologi teroris yang belum disetujui oleh hukum dan instrument international. **Ketiga**, Program Aksi OKI 2025 berupa tujuan strategis yang memvisikan peran OKI sebagai sebuah agen perdamaian dan pembangunan di dalam/ di luar dunia Islam. **Keempat**, Harmoni antar budaya dan antar keyakinan untuk pencegahan ekstrimis kekerasan terorisme dan pengentasan kemiskinan. **Kelima**, Rencana penyusunan pusat keamanan Siber OKI untuk menghadapi perang siber karena dapat mengancam perdamaian dunia. **Keenam**, Pada 1 Oktober 2016 mengoperasionalkan pusat dialog, perdamaian dan pemahaman OKI melalui internet dan media sosial guna mendelegitimasi dan mendekonstruksi yang dipropagandakan oleh kekuatan tertentu serta pembekuan status negara Suriah sebagai anggota OKI dalam rangka menekan agar mengakhiri konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan Bashar Al Assad yang menelan korban mencapai 82.275 orang.

OKI juga berperan di Yaman menyelenggarakan situasi keamanan, mendukung proses perdamaian di Afganistan, mewujudkan perdamaian dan keamanan serta pembangunan di Sudan (panadatangan dan implementasi dokumen Doha), menjaga kemitraan kritis dalam pembangunan di Somalia, proses dialog politik di Libya, Tim Mediasi International dalam dialog antar Malian di Mali, menjinakan ketegangan antar rival politik pada pemilu di Republik Afrika Tengah.

Beberapa peran OKI yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Pertama, Penanganan Radikalisme dan terorisme karena adanya agresi/kolonialisme politik, ketimpangan ekonomi, dan budaya yang kurang dapat menerima perbedaan dan pemicu terorisme disebabkan oleh semakin berkembangnya ISIS dan gerakan radikal lainnya, konflik/perang sipil di Negara Muslim dan Islamophobia. Oleh karenanya, efektifitas peran OKI dalam mengatasi radikalisme dan

terorisme di dunia Islam dengan meningkatkan peran OKI dalam mengatasi agresi/kolonialisme politik melalui optimalisasi kinerja Departemen Urusan Palestina dan Al Quds dalam organisasi OKI untuk mempertahankan dan pemberdayaan warga serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina, melaksanakan pemeliharaan kota Al Quds Al Sharif/Yerusalem merupakan keseriusannya untuk menghapus agresi/kolonialisme politik. Selain itu, sesuai Deklarasi Jakarta sebagai hasil dari KTT Luar Biasa OKI ke-5 di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 merupakan penguatan 23 langkah konkrit mendesak DK PBB menangani pemukiman ilegal yang dibangun Israel di Yerusalem yaitu dengan melemahkan tawaran “Solusi Dua Negara”. Selanjutnya keluarlah Resolusi DK PBB 2334 (2016) bahwa pembangunan pemukiman Israel tersebut sejak 1967 tidak punya validitas legal, sehingga Israel harus segera menghentikannya termasuk di Yerusalem Timur. Juga upaya membela dan memperjuangkan hak muslim minoritas yang hidup di Negara non muslim, contohnya muslim Rohingya di Myanmar.

Kedua, **Mengatasi ketimpangan ekonomi**, yaitu dengan pembentukan Departemen Urusan Ekonomi yang didukung oleh Negara donor (negara kaya) untuk mengakomodasi isu krusial dalam berbagai sektor ekonomi terutama segmen masyarakat dan pedesaan, namun belum berjalan optimal sesuai yang diharapkan karena dana yang dikumpulkan belum mencukupi secara totalitas.

Ketiga, **Penanganan budaya yang kurang menerima perbedaan**. Munculnya kelompok eksklusif yang memandang dirinya superior dan paling benar dengan memandang kelompok lainnya inferior dan salah, maka dapat menumbuhkan paham radikal. Terhadap hal ini OKI telah melaksanakan symposium di Bangkok pada 11 Januari 2016 dengan mempertemukan para akademisi dan ahli untuk saling bertukar pengalaman serta membentuk pusat dialog perdamaian melalui internet dan media sosial untuk mendelegitimasi dan mendeonstruksi narasi

ekstri oleh kelompok tertentu. Hal ini belum maksimal karena masih adanya kasus pengeboman Gereja di Samarinda Indonesia pada November 2016 dan gereja koptik di Mesir pada Desember 2016 karena hanya melibatkan kalangan elit, belum melibatkan masyarakat awam.

Keempat, **Mengatasi berkembangnya gerakan radikal seperti ISIS**. Terhadap aksi yang dilakukan oleh ISIS, OKI tidak pernah memberi pernyataan tentang keberadaan ISIS, hanya menyampaikan ucapan bela sungkawa saja. Penyebabnya adalah masih adanya permainan kepentingan dari anggota OKI, yaitu Qatar sebagai negara yang kaya ternyata pada tahun 2014 mendukung finansial ISIS dan oposisi Suriah dan Arab Saudi yang mendukung kelompok oposisi Sunni dalam melawan pemerintah Bahrain (sebatas informasi dari sumber terpercaya) guna menghindarkan diri dari target sasaran teroris. Langkah dari kedua Negara tersebut bisa saja dibenarkan mengingat belum adanya kesepakatan terkait definisi **pemberantasan terorisme international**. Sesuai konvensi OKI pasal 2 (a) tahun 1999, disebutkan bahwa perjuangan masyarakat, termasuk perjuangan bersenjata yang melawan pendudukan asing, agresi, kolonialisme dan hegemoni yang bertujuan untuk pembebasan dan penentuan nasib sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum international tidak akan dianggap sebagai kejahatan terorisme. Sehingga pasal ini dapat digunakan untuk menjustifikasi dukungan terhadap kelompok ikhwanul muslimin di Mesir dan kelompok oposisi bersenjata di Suriah termasuk kelompok separatist Kurdistan di Turki,

Kelima, **Mengatasi konflik internal di Negara-negara Muslim**, yaitu mengeluarkan Suriah sesuai KTT Luar Biasa OKI pada 14 Agustus 2012 dengan menekan Suriah untuk segera mengakhiri konflik yang terjadi karena dunia muslim tidak bisa menerima rezim yang membantai rakyatnya sendiri, namun Republik Islam Iran dan Aljazair menolaknya, Keenam, **Menghadapi Islamophobia** yang didefinisikan sebagai ketidaksukaan dan prasangka terhadap orang muslim/Islam dan

telah berkembang di Amerika dan Eropa dengan mendiskriminasi dan mengucilkan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Dalam hal ini OKI telah membentuk Islamophobia Observatory untuk menyebarkan bulletin bahwa Islam cinta damai kepada masyarakat umum. Namun demikian pada tahun 2016 justru meningkat kemunculannya akibat **fenomena Donald Trump** pada pemilihan presiden Amerika dengan mengkampanyekan diskriminasi Islam, berbagai serangan teroris di Eropa serta pengungsi Suriah.

Sedangkan, upaya Indonesia dalam OKI untuk menghadapi isu radikalisme dan terorisme, yaitu Indonesia mengeluarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan telah berhasil menangani kasus bom Bali I dan II dan hingga penanganan tahap deradikalisasi serta menetralkan partisipannya. Selanjutnya Menlu Retno mengajukan proposal kepada Presiden Jokowi mengenai rencana penguatan Negara Islam yang moderat pada saat konferensi di Kuwait Mei 2015 dan menjadi jembatan komunikasi antar anggota OKI karena bersifat netral serta melaksanakan kebijakan penuh dari OKI.

Penutup.

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

a. Kesimpulan. Radikalisme dan Terorisme Menjadi Isu Penting Dunia yang harus dihadapi oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai representasi Negara Muslim secara aktif, sehingga **secara normatif** pada tahun 1999 keluar dokumen pertama sebelum peristiwa WTC yang mendefinisikan terorisme dan penanganannya secara lebih tegas dan jelas serta secara praktis/teknis mengatasi faktor penyebabnya berupa agresi/kolonialisme politik, ketimpangan ekonomi, budaya yang kurang dapat menerima perbedaan, juga faktor pemicunya lainnya yaitu semakin berkembangnya gerakan radikal ISIS dan konflik perang sipil di Negara-negara muslim serta Islamophobia. Selain itu,

OKI dalam melaksanakan perannya sudah cukup efektif, namun ada sebagian yang belum efektif karena kontestasi kepentingan Negara-negara anggota yang berpengaruh yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan kolektif serta program kerja yang masih bersifat elitis dan belum terlalu melibatkan masyarakat muslim akar rumput.

b. Saran.

- 1) Perlunya OKI, untuk menyepakati definisi terorisme sesuai pasal 2 (a) dalam Konvensi OKI agar tidak multi tafsir, melakukan penguatan kelembagaan OKI agar negara besar tidak sewenang-wenang apabila tidak menerima keputusan kolektif, dan meningkatkan kerjasama lebih intensif dengan lembaga masyarakat sipil untuk menjangkau masyarakat akar rumput secara lebih luas, serta meningkatkan pendekatan kepada pemimpin dunia yang berpengaruh, media masa dan media sosial guna menciptakan citra Islam yang lebih positif.
- 2) Perlunya Pemerintah Indonesia, meningkatkan diplomasi sebagai negara penengah dalam kontestasi negara-negara anggota OKI yang lainnya, dan membangun semacam pusat penanggulangan radikalisme dan terorisme yang langsung di bawah Sekjen OKI, mengingat selama ini berada di bawah Departemen Urusan Politik.

Kolonel Inf Suwanto, S.I.P. adalah abituren Akmil 1989 dan lulusan Seskoad Tahun 2003, saat ini menjabat sebagai Kadepsos dan Tek Seskoad.

PASUKAN KAVALERI BERKUDA DALAM PERANG GERILYA



Mayor Kav Widhi Bayu

Pendahuluan

Perang Yarmuk (*Battle of Hieromyx*) terjadi sebelum penaklukan Damaskus dan diakui oleh sejarawan Barat sebagai perang yang paling gemilang dalam sejarah.¹ Perang Yarmuk merupakan perang antara tentara Muslim dengan Kekaisaran Romawi Timur pada 636 M. Sejumlah sejarawan menyatakan, Perang Yarmuk sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia, menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Nasrani.

Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang, dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu Komandan militer dan Kavaleri paling brilian di zaman Pertengahan. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, khilafah Rasyidah kedua. Pertempuran ini terjadi empat tahun setelah Nabi Muhammad meninggal pada 632 M. Kehebatan pasukan Kavaleri Berkuda Islam, sekali lagi terbukti dalam Pertempuran Sungai Talas pada 751 M antara Kekhalifahan Rasyidah dengan Dinasti Tang dari Cina. Bermodalkan pasukan Kavaleri Berkuda yang tangguh, tentara Muslim selalu berhasil meraih kemenangan.

Menilik latar belakang di atas, terlihat bahwa betapa kuat dan hebatnya pasukan Kavaleri Berkuda dalam mendominasi pertempuran. “Hampir semua operasi militer memerlukan pelibatan unsur-unsur dari unit atau satuan lain”, Letjen TNI (Purn) J. Suryo Prabowo.² Menyikapi pernyataan tersebut, bahwa perkembangan taktik dan strategi perang saat ini dihadapkan pada kemampuan satuan Denkavkud sebagai satu-satunya satuan Kavaleri Berkuda TNI AD, merupakan suatu pemikiran yang logis dan realistis jika pasukan Kavaleri Berkuda dilibatkan dalam tugas Operasi Militer Perang (OMP), khususnya dalam perang gerilya bersama dengan satuan lainnya. Jenderal Besar A. H. Nasution menjelaskan, “Perang gerilya tidak dapat secara sendiri membawa kemenangan terakhir, perang gerilya hanyalah untuk memeras darah musuh. Kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yang teratur dalam perang yang biasa, karena hanya tentara demikianlah yang dapat melakukan ofensif dan hanya ofensiflah yang dapat menaklukkan musuh”.³ Maka, pelibatan satuan Kavaleri Berkuda untuk menunjang perang gerilya yang ofensif dan efektif, memberikan khasanah baru dalam alam gerilya, sebagai perang darat yang terbukti ampuh dalam sejarah perjuangan merebut

1 <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2015/08/04/75111/6-hari-perang-yarmuk.html>

2 J. Suryo Prabowo, Letjen TNI (Purn), *Membangun Kemampuan Memimpin dalam Kehidupan Keprajuritan*, Media Pandu Bangsa, 2014, h. 61

3 A. H. Nasution, *Jenderal Besar, Pokok-pokok Gerilya*, Bandung, Angkasa, 1984, h. 7

kemerdekaan RI. Dengan demikian dapat, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu **“Mengapa pasukan Kavaleri Berkuda perlu dilibatkan dalam perang gerilya?”**.

Pentingnya pemecahan masalah dalam tulisan ini agar kemampuan yang dimiliki pasukan Kavaleri Berkuda dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin ditinjau dari sudut pandang strategi perang gerilya saat ini dan di masa mendatang.

Pembahasan

Operasi gerilya merupakan operasi untuk menghancurkan musuh yang telah menduduki wilayah NKRI dengan titik berat pada operasi gerilya guna mendapatkan imbalan kekuatan dan mengungguli kekuatan musuh.⁴ Dalam sejarah, setiap negeri yang memiliki akses atas sumber daya kuda, selalu mengadopsi Kavaleri ke dalam satuan militer mereka untuk berperang. Bahkan, ketika suatu negeri tidak memiliki pasukan berkuda untuk menyokong militer mereka, mereka akan mendatangkan sumber daya dari luar untuk memiliki satuan Kavaleri Berkuda, walaupun tidak semua negara mengadopsi konsep tersebut. Keuntungan dari pasukan Kavaleri Berkuda amatlah jelas. Dengan berkuda, pasukan dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan cepat, efektif dan efisien. Mobilitas Kavaleri Berkuda membuka berbagai kesempatan taktis baru bagi mereka yang mampu mengendalikannya.

Mengapa pasukan Kavaleri Berkuda perlu dilibatkan dalam perang gerilya?

Fakta empiris menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro sebagai seorang berdarah ningrat yang merupakan keturunan langsung Raja Yogyakarta, selalu diidentikkan dengan tunggangannya, seekor kuda gagah yang selalu menemani selama perjuangan. Pangeran Diponegoro adalah sosok pejuang yang ditakuti penjajah. Beliau memiliki strategi perang yang membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Dengan menunggangi kuda,

Pangeran Diponegoro berhasil menjalankan strategi perang gerilya.⁵ Fakta lain menunjukkan bahwa Ladrang Mangungkung, merupakan nama suatu perkumpulan (korps militer) wanita pejuang kemerdekaan Indonesia, yang berjuang melawan penjajah dengan menggunakan kuda sebagai alat perangnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data dimana Peter Carey, seorang Sejarawan berkebangsaan Inggris, menuliskan dalam bukunya berjudul “Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855”, menyebutkan bahwa “Ladrang Mangungkung adalah pengawal Sultan yang biasa disebut dengan Laskar Estri. Mereka dibekali senjata yaitu sepucuk bedil. Tak hanya piawai menggunakan senjata saja, namun mereka juga mahir dalam berkuda, bahkan menembak dengan berkuda”.⁶ Dengan adanya data dan fakta tersebut, nampak bahwa kiprah pasukan berkuda memberikan andil besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sebagai satu-satunya pasukan Kavaleri Berkuda yang dimiliki TNI AD, diharapkan satuan Denkavkud dapat terlibat langsung dalam mendukung tugas pokok TNI AD untuk melaksanakan tugas operasi militer perang, khususnya perang gerilya. Dengan adanya pelibatan tersebut, tentunya taktik dan strategi perang gerilya yang sudah ada menjadi lebih dinamis menyesuaikan dinamika ancaman yang semakin kompleks, sehingga mampu memberikan deterrence effect dan deterrence power di mata dunia.

Teori Sun Tzu mengatakan *“He will win who, prepared himself, waits to take the enemy unprepared”*,⁷ yang berarti kemenangan akan berpihak pada siapa yang mempersiapkan diri dengan baik dan matang, selanjutnya tinggal menunggu untuk merebut kemenangan itu dari musuh yang tidak siap. Kalimat bijak tersebut mengandung makna bahwa kita harus menyiapkan taktik dan strategi perang yang kemungkinan besar musuh tidak siap untuk

4 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/66/IX/2010 Tanggal 15 September 2010 tentang Strategi Militer

5 https://www.kompasiana.com/dr_wahyutriasmara/54f6e81ca33311635b8b4b9a/pemimpin-negara-perlu-pandai-berkuda

6 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/09/11/pejuang-wanita-indonesia-bukan-cuma-kartini-lho>

7 https://www.goodreads.com/author/quotes/1771.Sun_Tzu?page=3

menghadapinya, yaitu perang gerilya, dimana Indonesia terkenal dengan kemampuan gerilya-nya dan negara lain takut akan hal itu. Taktik dan strategi berkembang dinamis seiring perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pelibatan pasukan Kavaleri Berkuda merupakan ide dan inovasi baru yang harus dikembangkan dan belum pernah dilakukan oleh negara manapun.

Pelibatan pasukan Kavaleri Berkuda dalam perang gerilya dipengaruhi oleh faktor internal, dimana sumber daya dan kemampuan yang dimiliki satuan Denkavkud merupakan **kekuatan potensial** untuk dikerahkan dalam tugas tersebut. Namun, belum adanya doktrin pendukung dalam pelibatannya, menjadi **kelemahan** yang harus diatasi. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi, dimana kondisi geografis Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan dan gunung, merupakan **peluang besar** yang sangat memungkinkan untuk pengerahan pasukan Kavaleri Berkuda dalam perang gerilya. Dengan kemampuan mobilitas tinggi yang tidak terbatas dengan jaring jalan, bukan suatu penghalang bagi pasukan Kavaleri Berkuda untuk menaklukkan medan tersebut. Namun, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dihadapkan pada kekuatan organisasi Satuan Kavaleri Berkuda, juga menjadi **kendala** dalam kemampuan pengerahannya.

Guna menjawab permasalahan terkait pasukan Kavaleri Berkuda dalam perang gerilya ditinjau dari data dan fakta, Faktor-faktor yang mempengaruhi dan teori perang Sun Tzu, maka dapat dilakukan suatu **upaya konstruktif** dengan **menganalisis** kemampuan pasukan Kavaleri Berkuda. Pasukan Kavaleri Berkuda sebagai pasukan yang mumpuni, perlu dilibatkan untuk mendukung mobilitas pasukan gerilya dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia yang penuh dengan rintangan alam. Seperti yang dijelaskan oleh Letjen TNI (Purn) J. Suryo Prabowo, "Taktik

yang paling efektif dan selalu digunakan dalam memenangkan pertempuran adalah taktik pertempuran yang dilakukan oleh satuan kecil dengan menggunakan mobilitas tinggi."⁸ Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa perang gerilya membutuhkan mobilitas yang tinggi agar efektif menghancurkan musuh. Kemampuan mobilitas pasukan Kavaleri Berkuda dapat diandalkan untuk bergerak bersama pasukan Infanteri dalam mencari, mendekati dan menghancurkan musuh di medan gerilya. Pasukan Kavaleri Berkuda bergerak dalam hubungan kecil sebagai bagian dari satuan yang lebih besar, dalam hal ini adalah pasukan Infanteri berjalan kaki. Prinsip-prinsip perang menyatakan, "Untuk dapat melakukan konsentrasi, perlu keberhasilan manuver"⁹ Penggunaan pasukan Kavaleri Berkuda dalam perang gerilya memberikan keuntungan dan keunggulan yang optimal, karena pasukan gerilya dapat melakukan manuver dengan cepat dan memberikan pendadakan bagi musuh, sehingga musuh dapat dihancurkan dalam kondisi tidak siap. Pasukan Kavaleri Berkuda dapat digunakan sebagai satuan penghemat tenaga untuk melakukan pengintaian, pengamanan lambung pasukan, penyergapan dan penghadangan serta pengejaran terhadap musuh yang melarikan diri. Dengan kemampuan kuda dan prajurit yang terlatih, pasukan Kavaleri Berkuda dapat bergerak dengan senyap untuk menjamin kerahasiaan pasukan gerilya. Selain itu pasukan Kavaleri Berkuda dapat dimanfaatkan untuk membawa logistik yang dibutuhkan oleh pasukan gerilya selama di medan gerilya.

Ada satu hal menarik terkait kebijakan Bapak Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa. Ide cemerlang beliau menginginkan adanya suatu konsep perang gerilya modern, yaitu perang gerilya yang dilaksanakan secara simultan dengan kolaborasi antar kecabangan yang mengerahkan seluruh kekuatan Alut/Alutsista yang dimiliki. Kebijakan tersebut selaras dengan pernyataan Letjen TNI

8 J. Suryo Prabowo, Letjen TNI (Purn), *Bagaimana Memahami dan Membuat Taktik Pertempuran Darat yang Seharusnya Digunakan di Indonesia*, Media Pandu Bangsa, 2013, h.262.

9 Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn), *Si Vis Pacem Parabellum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.29

(Purn) J. Suryo Prabowo, bahwa “Seorang pemimpin harus adaptif, atau menyesuaikan dengan komunitas yang hendak dipimpinnya”.¹⁰

Penutup

Penggunaan pasukan Kavaleri Berkuda dalam perang gerilya merupakan ide dan inovasi baru dalam perkembangan taktik perang gerilya yang senantiasa dinamis menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, sehingga dapat diambil **kesimpulan** sebagai pembelajaran (*lesson learned*) ditinjau dari perspektif strategi militer, bahwa “Taktik yang paling efektif dan selalu digunakan dalam memenangkan pertempuran adalah taktik pertempuran yang dilakukan oleh satuan kecil dengan menggunakan mobilitas tinggi” dan “Untuk dapat melakukan konsentrasi, perlu keberhasilan manuver”. Sedangkan ditinjau dari perspektif kepemimpinan militer, bahwa “Seorang pemimpin harus adaptif, atau menyesuaikan dengan komunitas yang hendak dipimpinnya”. Kedua perspektif tersebut selaras dengan ide dan inovasi baru bahwa pelibatan pasukan Kavaleri Berkuda dalam perang gerilya adalah pemikiran yang logis dan relevan untuk dipersiapkan dan dikembangkan dalam strategi dan taktik perang TNI AD.

Dari kesimpulan di atas, dapat **direkomendasikan** bahwa TNI AD perlu mengambil langkah dalam menyikapi ide dan inovasi baru terkait pelibatan pasukan Kavaleri Berkuda dalam perang gerilya, dengan melakukan pengkajian, penyusunan doktrin dan Orgas serta uji coba lapangan, agar dapat diterapkan di satuan operasional jajarannya.



Image:sosok.ID

Mayor Kav Widhi Bayu Sudibyo adalah abitren Akmil 2004 dan lulusan Dikreg LIX Seskoad Tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Pabandyaprog Srendam I/BB.

10 J. Suryo Prabowo, Letjen TNI (Purn), *Membangun Kemampuan Memimpin dalam Kehidupan Keprajuritan, Media Pandu Bangsa*, 2014, h.34

KONFLIK IDEOLOGI YANG MEMBELAH SEMENANJUNG KOREA



Mayor Inf Kukuh Prakosa, S.A.P., M.I.P.

PENDAHULUAN

Korea, itulah nama dari sebuah semenanjung yang terletak di Asia Timur. Ada 2 negara yang saat ini menempati Semenanjung Korea: Korea Utara dan Korea Selatan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Semenanjung Korea bisa ditempati oleh 2 negara walaupun dari segi komposisi etnis, penduduk dari kedua negara tersebut bisa dikatakan serumpun. Perang Korea adalah perang yang terjadi di Semenanjung Korea antara Korea Utara yang disokong oleh negara-negara komunis melawan Korea Selatan yang didukung oleh pasukan koalisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perang tersebut berlangsung selama 3 tahun (1950 - 1953). Namun, secara resmi perang tersebut sebenarnya masih berlangsung hingga sekarang karena masih belum adanya kesepakatan damai yang jelas antara pihak-pihak yang berkonflik. Akibat Perang Korea, lebih dari 3 juta orang harus tewas & wilayah Semenanjung Korea kini ditempati oleh 2 negara yang memiliki perbedaan ideologi.

Dengan memedomani latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : "Bagaimana Terjadinya konflik ideologi yang membelah Semenanjung Korea ?" Adapun nilai guna dalam penulisan esai ini adalah memberikan sumbang pemikiran penulis dalam menyikapi tentang terjadinya konflik ideologi yang membelah Semenanjung Korea.

PEMBAHASAN

Sejak tahun 1910, wilayah Semenanjung Korea dikuasai oleh Jepang. Memasuki tahun 1945 yang juga merupakan fase akhir dari Perang Dunia II, Uni Soviet atas izin negara-negara Blok Sekutu menginvasi Manchuria (Cina Utara) & menduduki Semenanjung Korea bagian utara. Tiga (3) minggu kemudian, pasukan AS tiba di Semenanjung Korea dan menduduki wilayah semenanjung bagian selatan. Jatuhnya Semenanjung Korea ke tangan pasukan Uni Soviet & AS sekaligus mengakhiri kekuasaan Jepang atas wilayah Korea. Bulan Juli hingga Agustus 1945, negara-negara Sekutu & Uni Soviet menggelar Konferensi Potsdam untuk memutuskan nasib Semenanjung Korea tanpa melibatkan perwakilan dari orang-orang Korea sendiri. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam konferensi tersebut, Semenanjung Korea pun dibagi menjadi 2: wilayah utara yang dikendalikan oleh Uni Soviet & wilayah selatan yang dikelola oleh AS. Batas pemisah antara wilayah utara dan selatan dikenal sebagai "garis paralel ke-38".

Tahun 1947, PBB mengajukan proposal untuk menggelar Pemilu untuk menentukan badan pemerintahan baru yang kelak akan menguasai seluruh Semenanjung Korea. Proposal tersebut juga mencakup penarikan mundur seluruh pasukan asing dari Semenanjung Korea. Namun, proposal tersebut ditolak oleh Uni Soviet yang ingin menciptakan

negara boneka pro-Soviet di Semenanjung Korea bagian utara agar wilayah Soviet tidak berbatasan langsung dengan wilayah Korea bagian selatan yang condong memihak AS. Tahun 1948, 2 negara baru akhirnya terbentuk di Semenanjung Korea: Republik Demokratik Rakyat Korea yang berlokasi di semenanjung bagian utara & berhaluan sayap kiri, serta Republik Korea yang berlokasi di semenanjung bagian selatan dan berhaluan sayap kanan. Baik Korea Utara maupun Selatan masih belum puas akan kondisi mereka sekarang dan sama-sama terobsesi untuk menaklukkan tetangganya demi menjadi pihak penguasa seluruh Semenanjung Korea. Sebagai akibatnya, sejak tahun ini kontak senjata di perbatasan kedua negara mulai sering terjadi hingga akhirnya memuncak menjadi perang terbuka.

Terjadinya perang dimulai Bulan Juni 1950, pasukan Korea Utara (Korut) menyerbu masuk wilayah Korea Selatan (Korsel) dan pecalah Perang Korea. Korut berdalih kalau serangannya ke wilayah selatan adalah untuk menangkap pasukan Korsel yang sebelumnya menyerang pasukan Korut dari balik garis perbatasan dan kemudian melarikan diri. Namun, belakangan diketahui kalau serangan Korut ke Korsel sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari dan mendapat izin dari Cina serta Uni Soviet. Hanya dalam waktu singkat, pasukan Korut berhasil mendesak mundur pasukan Korsel yang saat itu memang tidak siap. Di luar Korea, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (DK PBB) mengutuk serangan Korut ke Korsel dan meminta negara-negara anggotanya menyiapkan pasukan untuk membantu pihak Korsel. Niat PBB untuk mengintervensi Perang Korea lewat jalur militer sebenarnya bisa digagalkan oleh Uni Soviet sebagai salah satu anggota DK PBB yang memegang hak veto. Namun, Uni Soviet memilih untuk memboikot sidang PBB pada periode itu karena PBB lebih memilih untuk menempatkan Taiwan alih-alih Cina sebagai anggota DK tetap PBB. Tak lama setelah muncul resolusi dari PBB, ada 21 negara yang bersedia mengirimkan personel militernya ke

dalam pasukan PBB. Ke-21 negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Afrika Selatan, Australia, Belgia, Denmark, Ethiopia, India, Italia, Kanada, Norwegia, Perancis, Filipina, Kolombia, Yunani, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Swedia, Thailand, dan Turki. Dari sekian banyak negara tersebut, negara yang paling banyak menyumbangkan personel militernya adalah AS. Pemimpin dari pasukan koalisi PBB juga merupakan orang berkebangsaan AS, yaitu Jenderal Douglas McArthur. Pasukan koalisi PBB akhirnya tiba di Semenanjung Korea pada awal bulan Juli 1950.

Masuknya pasukan PBB langsung mengubah arah pertempuran secara drastis. Jika sebelumnya pasukan Korut bisa terus bergerak ke sebelah selatan Semenanjung Korea nyaris tanpa kendala berarti, sesudah pasukan PBB ikut campur pasukan Korut tidak bisa lagi melanjutkan pergerakannya lebih jauh. Bahkan ketika memasuki bulan Oktober 1950, Korut berbalik menjadi pihak yang tertekan setelah pasukan PBB mengusir pasukan Korut keluar wilayah Korsel dan mengejar mereka sampai ke wilayah Korut. Berbaliknya alur peperangan yang tidak lagi menguntungkan pihak Korut langsung menarik perhatian pihak Cina, negara tetangga sekaligus sekutu dari Korut. Maka pada akhir bulan Oktober 1950, Cina pun mengirim 200.000 prajuritnya ke Semenanjung Korea untuk membantu pihak Korut. Uni Soviet sebagai negara sekutu lain dari Korut juga ikut mengirimkan bantuan persenjaan ke pihak Cina dan Korut. Namun Soviet masih enggan mengirimkan pasukannya untuk terjun langsung di medan perang.

Ikut campurnya pasukan Cina di medan perang membawa keuntungan besar bagi pihak Korut yang sukses mengusir pasukan gabungan Korsel dan PBB keluar wilayah Korut di akhir tahun 1950. Memasuki awal tahun 1951, pasukan gabungan Cina dan Korut bahkan kembali menjadi pihak penyerbu di mana pada periode tersebut, pasukan gabungan keduanya sukses menduduki kembali Seoul, ibukota dari Korsel. Salah satu kunci kesuksesan dari keberhasilan pasukan Cina dan Korut adalah pemakaian suara-suara gong dan terompet

yang keras saat melakukan penyerbuan sehingga pasukan PBB merasa panik. Bulan Maret 1951, pasukan gabungan Korsel dan PBB sukses merebut kembali Korsel dari tangan pasukan komunis. Pada periode yang kurang lebih bersamaan, Cina meminta bantuan perlindungan dari udara ke pihak Soviet.

Uni Soviet sendiri pada awal-awal perang sebenarnya kurang percaya pada kekuatan pasukan Cina dan Korut sehingga enggan mengirim pasukan langsung ke medan perang. Namun, setelah melihat bagaimana pasukan gabungan keduanya bisa membuat pihak lawan kerepotan, Uni Soviet akhirnya menyetujui permintaan Cina tersebut dan mengirim 2 divisi pasukan udara serta 600 truk.

Masih di bulan Maret 1951, Cina kembali melakukan penyerbuan dengan pasukan berjumlah 700.000 personil. Awalnya pasukan Cina berhasil menerobos garis perbatasan Korut-Korsel dan mendekati ibukota Seoul. Namun memasuki bulan Mei, pergerakan mereka berhasil ditahan oleh pasukan AS yang kemudian sukses mengusir pasukan Cina keluar wilayah Korsel.

Pasca pertempuran tersebut, perang masih tetap berlangsung, namun hanya terjadi sedikit pergeseran di garis depan karena kedua belah pihak lebih memilih untuk menggelar taktik defensif demi mencegah jatuhnya wilayah mereka ke tangan musuh. Buntutnya situasi di garis depan lantas membuat kedua belah pihak mulai menempuh jalur negosiasi untuk menemukan solusi mengakhiri perang. Perundingan pertama digelar pada bulan Juli 1951. Namun selama perundingan berlangsung, perang masih tetap berjalan.

Bulan Juli 1953, gencatan senjata hingga batas waktu yang tidak ditentukan akhirnya berhasil dicapai oleh kedua belah pihak dan Perang Korea pun berakhir tanpa pemenang yang jelas. Pasca dicapainya gencatan senjata, wilayah kekuasaan Korut mengalami sedikit penyusutan jika dibandingkan dengan saat sebelum perang.

Penyatuan Korea Utara dan Korea Selatan ibarat mimpi indah perdamaian yang sukar terwujud. Apalagi setelah rentetan pelanggaran perjanjian hingga pengunduran diri Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yeon-chul. Generasi muda Korea sudah tidak terlalu memikirkan untuk bersatu karena lahir di masa damai, tidak mengalami situasi Korea sewaktu perang. Pemuda di Korea Selatan juga mendapat doktrin dari pemerintah, Korea Utara merupakan pihak yang jahat dan menakutkan.

Imbasnya, pemuda di Selatan memandang Utara bukan sebagai saudara dan bukan bagian yang terpisahkan dari Korea, kendati sebenarnya secara rumpun, mereka adalah satu darah. Meskipun kini pemerintah Korea Selatan kembali menanamkan pemahaman dan berusaha agar kedua masyarakat dua Korea saling mengenal melalui kebijakan politik dan pertukaran budaya, namun hasilnya kurang mendapat tanggapan baik dari generasi muda.

Perdamaian yang sulit diwujudkan dilatarbelakangi intervensi kekuatan asing yang ingin mempertahankan ketegangan dan memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan sempit mereka.

PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahasan esai ini kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasannya Perang Korea merupakan Perang yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, masing-masing pihak dibantu oleh pihak lain. Perang ini merupakan perang yang disebabkan oleh Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Perang Korea terjadi dari tahun 1950 hingga 1953. Pada tahun 1953 kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan mengalami pasang surut. Krisis nuklir menjadi ancaman utama di Semenanjung Korea. Tercatat dari tahun 1953 hingga 1990-an kedua negara terlibat aksi saling mengancam dan terlibat rencana aksi pembunuhan dan pemboman.

Mayor Inf Kukuh Prakosa, S.A.P., M.I.P. adalah abituren Akmil 2006 dan lulusan Dikreg LIX Seskoad TA 2020, saat ini menjabat sebagai Wadanyonif 121/MK Brigif 7/RR Kodam I/BB.

PERAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI REPUBLIK MALI

Letkol Arh Dr. Heri Wijanarko.S.Sos., M.Sc.

PENDAHULUAN

Perang kerap dijadikan alasan sebagai alat untuk pengembangan sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Clausewitz (1933: 83) perang dapat terjadi karena gejolak sosial domestik suatu negara, dimana terdapat aksi kekerasan tanpa batas oleh negara. Kekerasan dapat dipicu oleh pertentangan kepentingan, sikap emosional, rentang waktu, sumber daya, faktor geografis, perseteruan etnis dan sebagainya. Demikian juga dengan konflik di Republik Mali yang menjadi isu global karena berlangsung lama dengan dampak negatif yang ditimbulkan serta rumitnya penyelesaian konflik di Mali. Hal ini sesuai dengan pandangan Clausewitz yang menilai bahwa perang dan strategi sebenarnya adalah suatu instrument dan cara untuk mencapai kepentingan politik. *"The war is not merely a political act, but also a real political instrument, a continuation of political commerce"*. Semakin besar keinginan-keinginan politik, maka akan semakin besar pula intensitas perang yang akan terjadi dan begitu pula sebaliknya.¹

Konflik yang terjadi di Republik Mali merupakan konflik vertikal yang melibatkan pemerintahan Mali dengan kelompok masyarakatnya. Konflik ini menjadi rumit karena terjadi berkepanjangan tanpa adanya solusi pemecahan. Efek konflik berkepanjangan di Mali jelas berdampak luas baik terhadap

kelangsungan hidup negara dan masyarakat Mali serta berefek terhadap negara-negara tetangga.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penting kiranya untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Mali serta menganalisis strategi diplomasi dan negosiasi yang digunakan dalam penyelesaian konflik di Mali. Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan studi pustaka.

Pembahasan

Perang merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah, karena peperangan hanya menimbulkan banyak kerugian bagi negara serta mengganggu negara lain di luar negara yang berkonflik. Hal ini menjadi latar belakang dari negara- negara lain untuk turut serta dalam penyelesaian konflik di suatu negara guna mencegah serta meminimalisir dampak dari adanya peperangan. Disinilah peran penting diplomasi dan negosiasi dalam mencegah terjadinya perang.² Namun demikian, jalan penyelesaian diplomasi antar negara terkadang menemui jalan buntu hingga berakhir dengan peperangan. Kerumitan penyelesaian konflik dipengaruhi juga oleh beragam faktor yang menjadi penyebabnya hingga beragam cara dan strategi dalam

1 Naskah Departemen Masstra tentang MP. Teori dan Sejarah Perang, halaman 28

2 Junjungan Sigalingging, "Pentingnya Diplomasi", Diakses dari <https://kumparan.com/junjungan-sigalingging>

menyelesaikan konflik.

Terjadinya konflik atau peperangan memiliki beragam faktor penyebab. Penyebab terjadinya konflik menurut beberapa teori sebagai berikut ; 1) Teori kebutuhan manusia, yaitu konflik disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial berupa keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering menjadi inti terjadinya konflik; 2) Teori identitas, yaitu terjadinya konflik karena terancamnya identitas karena hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan; 3) Teori kesalahpahaman antar budaya, yaitu konflik karena ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda; dan 4) Teori transformasi konflik, yaitu konflik yang disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.³

Sejarah konflik panjang antara Pemerintah Mali dengan kelompok pemberontak *National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) dimulai sejak 1961 yaitu 1 tahun setelah Mali merdeka dari Perancis. Pemberontakan etnis Tuareg dikarenakan tidak setuju atas sistem pemerintahan negara Mali yang melarang etnis Tuareg untuk tinggal dan bekerja di luar wilayah Azawad. Kebijakan pemerintah Mali di anggap mendiskriminasi etnis Tuareg dan hal ini yang menjadi akar permasalahan awal banyaknya pemberontakan di Mali.⁴ Pemberontakan tersebut masih bisa ditangani oleh pihak pemerintah Mali. Semenjak itu diberlakukan undang-undang darurat militer dan seluruh penduduk sipil dilarang mendekati daerah Azawad. Pada awal tahun 1970 hingga akhir 1980-an daerah Mali mengalami kekeringan dan kondisi ini menyebabkan banyak etnis Tuareg mengungsi ke negara-negara tetangga seperti negara Libya, sehingga mereka direkrut oleh militan Libya (*Legium Islam*) dan disinyalir mempersenjatai dan mendidik ilmu kemiliteran. Pada akhirnya

etnis Tuareg melakukan pemberontakan di Mali sekitar tahun 1991. Namun pemberontakan ini masih bisa diredam oleh pemerintah Mali. Alpha Konare sebagai Presiden Mali memberikan otonomi kepada Azawad guna meredakan konflik untuk beberapa waktu.

Perkembangan konflik selanjutnya adalah pada tahun 1992 merupakan Pemilu pertama di Mali. Pemberontakan secara fisik tidak terjadi namun terjadi gesekan dalam urusan politik. Pada awal tahun 2006, sebagai efek dari konflik politik pemerintah Mali menyetujui pemberian otonomi daerah bagian Padang Pasir Utara (daerah Azawad) sebagai tuntutan dari etnis Tuareg. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2007 hingga 2009 banyak dari pasukan Tuareg yang dahulunya adalah anggota "*Legium Islam*" ikut menjadi partisipan dalam konflik di Libya. Setelah konflik di Libya selesai pada tahun 2011 tentara-tentara "*Legium Islam*" yang berasal dari Mali khususnya daerah Azawad kembali ke daerah Azawad dan merencanakan untuk membuat negara baru yang bernawa Azawad. Pada Januari 2012, para pemberontak dari daerah Azawad yang di sebut sebagai *National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) melakukan kampanye agar pemerintah Mali segera memberikan kemerdekaan atas Azawad. Tuntutan tersebut tidak mungkin disetujui oleh pemerintah Mali karena 60% wilayah Mali adalah daerah Azawad. Konflik Mali semakin kompleks dengan munculnya kudeta militer *National Committee for the Restoration of Democracy and State* (CNRDR) terhadap Presiden Mali (Amadou Toumani Toure) pada bulan Maret 2012. Peristiwa ini dipicu karena pemerintah dianggap tidak mampu menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi. Efek kudeta mengakibatkan minimnya kontrol terhadap otonomi daerah karena hanya dipimpin oleh Presiden dan Menteri sementara. Lemahnya politik pemerintahan pasca kudeta dimanfaatkan oleh MNLA untuk melakukan pemberontakan dan pada 6 April 2012 dan pemerintahan Mali harus kehilangan Azawad

3 Simon Fisher dkk, *Op. Cit.*, hlm. 8-9. Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak* (Terjemahan Rita Maharani dkk) (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), hlm. 4.

4. 4 Dimas prihadi, "Memahami Konflik Di Mali-Misi Perdamaian PBB Paling Mematikan" Diakses dari <https://kumparan.com/dimas-prihadi/memahami-konflik-di-mali-misi-perdamaian-pbb-paling-mematikan-1rjUFSR4TXn#:~:text=Konflik%20bersenjata%20di%20Mali%20dimulai,yang%20mencakup%20semua%20Mali%20Utara.>

(Mali utara) yang jatuh di tangan MNLA. Keberhasilan pemberontakan MNLA dibantu oleh beberapa kelompok lain yaitu *Islam Ansar Dine*, *Al-Qaida in the Islamic Maghreb* (AQIM), dan *the Movement for Unity and Jihad in west Africa* (MUJAO). Pada dasarnya, kelompok-kelompok tersebut membantu MNLA dalam memerdekakan Azawad dengan tujuan ingin mengatur pemerintahan Azawad dengan hukum-hukum islam dalam segala aspeknya. AQIM dan MUJAO adalah kelompok-kelompok yang muncul untuk untuk menegakan syariat islam di sebagian Mali utara yaitu Kidal, Gao, dan Timbuktu (Angelia, 2013).

Ditinjau dari keterlibatan aktor-aktor dalam konflik di Mali maka konflik di Mali cukup rumit dan berkembang karena banyak aktor terlibat. Awal konflik bersumber dari permasalahan atau konflik internal negara dan pada akhirnya berkembang menjadi konflik eksternal dengan masuknya negara luar yang terlibat dalam konflik. Hal ini sesuai pandangan Soerjono Soekanto bahwa konflik internal terjadi antar masyarakat dalam sebuah negara karena adanya perbedaan pendapat, cara pandang, tujuan dan berupaya memaksakan kehendaknya sehingga ada pihak yang terancam.⁵ Posisi pendukung dari MNLA dianggap memiliki kekuatan yang cukup kuat yaitu AQIM dan MUJAWO sebagai kelompok berkepentingan berbasis Islam yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda (Angelia, 2013). Sedangkan dari sisi pemerintahan Mali banyak mendapat dukungan dari Prancis berupa kekuatan militer tambahan. Ketika MNLA mengancam akan menuju ke Bamako pada awal 2013, Prancis merespons dengan mengirim pasukan untuk merebut kembali kendali atas kota-kota utara Mali (Operasi Serval). Intervensi Prancis ini tidak berhasil menghilangkan konflik, namun kelompok Jihadis hanya mundur untuk mengatur strategi dan kembali menyerang misi penjaga perdamaian PBB MINUSMA, serta pasukan Mali dan Prancis dengan sasaran warga sipil di ibukota Bamako. Keterlibatan Amerika dalam

konflik Mali terlihat dari dukungan dan bantuan tindakan intervensi yang dilakukan oleh Prancis (Omba, 2008). Posisi kekuatan Amerika dan Prancis sudah tidak bisa diragukan karena ke dua negara tersebut anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB.⁶

Konflik vertikal yang terjadi di Mali sebaiknya diambil jalan penyelesaian secara negosiasi intern yaitu antara pemerintah dan kelompok pemberontak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pihak ke - 3 yang ikut campur urusan dalam negeri. Adanya pihak ke - 3 sulit untuk menilai netralitas mereka atas bantuan dukungan yang diberikan. Timbulnya fenomena penyimpangan adalah hadirnya pihak ke - 3 sebagai penengah yang diharapkan apat menyelesaikan konflik dengan menjadi penengah namun kehadiran pihak ke 3 malah menimbulkan permasalahan baru sehingga konflik menjadi berkepanjangan.

Berdasarkan data dan fakta diatas dapat diketahui bahwa konflik terjadi karena adanya tekanan dari pihak pemberontak kepada pemerintah akibat adanya diskriminasi kepada etnis Tuareq. Hal ini sesuai dengan teori identitas, yaitu terjadinya konflik karena terancamnya identitas karena hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sedangkan sesuai teori kebutuhan manusia, yaitu konflik disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial berupa keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering menjadi inti terjadinya konflik. Clausewitz menggagas tiga konsep dasar yang terkenal yang disebut *Three Dimensions of Wondrous Trinity*, yaitu adanya aksi sebagai aktualisasi dari perang yang merupakan kelanjutan dari kebijakan politik. Aksi disini menjurus pada konfrontasi fisik antara pihak yang berselisih.⁷

Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan secara internal namun belum menemukan kesepakatan. Kendala dalam penyelesaian konflik ini dipengaruhi oleh kehadiran pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik sehingga menjadikan permasalahan berkembang

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 107.

⁶ <https://kumparan.com/dimas-prihad/memahami-konflik-di-mali-misi-perdamaian-pbb-paling-mematikan-1rjUFSR4TXn/full>

⁷ Naskah Departemen Masstra, MP. Teori dan Sejarah Perang, halaman 26

semakin rumit. Keterlibatan pihak ke - 3 baik kelompok maupun aktor negara masing-masing memberikan dukungan kepada pihaknya. Pemerintah Mali didukung oleh negara Prancis, sedangkan Prancis sendiri didukung oleh Amerika. Sehingga pemerintah Mali memiliki dukungan yang kuat, sedangkan kelompok pemberontak (MNLA) hanya mendapat dukungan dari militansi Islam Palestina namun memiliki sikap yang keras dalam mendukung kemerdekaan Awazad.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat diambil jalan penyelesaian yaitu 1) memperjelas akar konflik dengan mengembalikan permasalahan kepada intern Mali yaitu negosiasi antara pemerintah Mali dengan kelompok MNLA dengan meniadakan kehadiran pihak ke - 3 sebagai upaya menghilangkan kendala dalam penyelesaian konflik. Kehadiran pihak ke - 3 disinyalir menjadi menghambat dalam mewujudkan kesepakatan pihak konflik, karena memiliki maksud dan tujuan tersendiri untuk mengambil keuntungan dari adanya konflik. 2) Negosiasi membahas inti permasalahan utama yaitu adanya keinginan Awazad untuk diberikan otonomi dan menghapuskan sikap pemerintah yang diskriminasi terhadap etnis Tuareg. Hal ini dimungkinkan karena adanya peluang yaitu pemerintah Mali sudah berupaya memberikan otonomi kepada Awazad namun pihak MNLA meminta wilayah yang lebih luas. Negosiasi ini harus dibangun kembali dalam upaya menciptakan kedamaian di Mali sehingga membawa manfaat positif bagi semua pihak. Peran diplomasi dan negosiasi menjadi hal penting sebagai salah satu jalan damai dalam penyelesaian sebuah konflik. Hal ini sesuai dengan sistem *balance of power* yang menyediakan berbagai alternatif bagi para *policy makers*, apakah memilih perang atau berusaha menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang *acceptable* melalui negosiasi. Sistem *balance of power* juga bisa dianggap berada diantara keteraturan dunia (*world order*) dan kekacauan internasional (*international chaos*).

Keteraturan dunia (*world order*) sehingga membutuhkan suatu otoritas pusat yang cukup mampu menetapkan suatu tata tertib bagi aktor-aktor politik.⁸ Penyelesaian konflik di Mali yang rumit pada akhirnya menempuh jalan diplomasi dan negosiasi. Human Rights Watch (HRW) mendesak perjanjian damai di Mali Utara. Pemerintah Mali menandatangani perjanjian pendahuluan dengan sebagian kelompok separatis di utara Mali. Aliansi pemberontak Tuareg meliputi Gerakan Nasional Pembebasan Azawad (MNLA) menghadiri acara perjanjian, namun pemberontak Tuareg dan kelompoknya menahan karena meminta konsesi lebih besar. Perjanjian damai yang selama ini dibuat untuk mengakhiri krisis militer dan konflik di Mali Utara tidak cukup mengatasi kebutuhan keadilan bagi warga sipil di Mali Utara. Pada akhir 2014 Menlu Aljazair menyatakan tim mediasi internasional telah menghasilkan rancangan perjanjian damai dan dimotori oleh Misi Penjaga Perdamaian PBB. Aktor-aktor yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian di Algiers 2015 adalah 1) pemerintah Mali; 2) aliansi milisi pro-pemerintah yang dikenal sebagai *Plateforme*, dan 3) Koordinasi Gerakan Azawad (CMA), sebuah koalisi kelompok yang mencakup etnis Arab dan Tuareg. Namun ada kelompok lain memboikot perjanjian dan menuntut dilibatkan dalam proses, seperti kelompok des Mouvements de l'Entente (CME), serta faksi lain dari *Mouvement pour le Salut de l'Azawad* (MSA). Berbagai kelompok bersenjata dan milisi lainnya juga menuntut akses ke beberapa manfaat dari perjanjian tersebut, khususnya program Pelucutan Senjata, Demobilisasi, dan Reintegrasi (DDR) yang akan menjamin manfaat ekonomi dan kemungkinan reintegrasi ke dalam pasukan pertahanan dan keamanan Mali.

Penandatanganan perjanjian perdamaian di Algiers pada Juni 2015 ternyata tidak cukup memperbaiki situasi di Mali. MINUSMA sebagai misi penjaga perdamaian PBB terbesar di dunia

⁸ Naskah Departemen Sos Tek MP. Diplomasi dan Negosiasi halaman 17

belum berhasil mengembalikan otoritas negara. Berbagai konflik telah terjadi sejak perjanjian ditandatangani. Kelompok-kelompok Jihadis telah tumbuh dan menyebar ke Burkina Faso dan Niger, dan konflik-konflik lokal juga telah merebak dengan cara-cara baru. Sampai detik ini, Mali masih terus dihantui dengan rasa tidak aman. Upaya penegakkan hukum di Mali juga terkendala karena para hakim takut melakukan investigasi karena adanya intimidasi dari kelompok jihad. Kelompok jihadis kerap kali melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para hakim. Sebagai gantinya, kelompok jihad membentuk sistem peradilan paralel yang menghancurkan infrastruktur penegakan hukum di kawasan Mali Utara.

Berdasarkan cara penyelesaian diplomasi damai dalam kasus konflik di Mali belum mampu menampung inspirasi pihak yang berkonflik, sehingga menyikan konflik selanjutnya. Negosiasi yang diambil adalah kalah - kalah yaitu pemerintah memberikan otonomi dan pemberontak belum mencapai apa yang diinginkan sehingga kedua belah pihak belum mencapai hasil yang diinginkan. Upaya damai yang ditawarkan hendaknya mampu menampung aspirasi dari kedua belah pihak. Menciptakan konsesi yang saling menguntungkan akan lebih bernilai dengan membuka kemungkinan kedua belah pihak membuat konsesi yang harganya sedikit dengan imbalan keuntungan yang memiliki nilai lebih besar. Hal ini dapat berarti bahwa konsesi mungkin berbeda nilai untuk masing-masing pihak.⁹

Penyelesaian konflik di Mali sebetulnya sudah diupayakan dengan berbagai cara serta melibatkan berbagai pihak hingga menghadirkan PBB dalam upaya mewujudkan perdamaian di Mali. Kehadiran berbagai pihak ke - 3 seharusnya sudah dapat menyelesaikan konflik di Mali, namun kenyataannya konflik terus terjadi meskipun perjanjian perdamaian sudah disepakati dan ditandatangani oleh ke 2 belah pihak. Sesuai teori bahwa kehadiran pihak ke 3 baik secara personil maupun NGOs

hingga INGOs dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Namun fenomena kasus konflik di Mali yang terjadi berbalik dengan teori yang ada yaitu konflik menjadi rumit dengan kehadiran pihak ke 3. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya aspirasi dari pihak yang berkonflik. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan manusia, yaitu konflik disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Adanya ketimpangan tersebut maka kelompok MNLA berupaya membangun kekuatan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah Mali. Hal ini sesuai dengan teori *balance of power* bahwa suatu negara akan memperkuat kekuatannya untuk menjaga identitasnya.¹⁰

Upaya negosiasi damai masih menemui kendala dan kelemahan yaitu adanya aspirasi dari pihak berkonflik yang belum terwadahi sehingga kesepakatan damai yang terjadi tidak dianggap atau diabaikan. Hal ini dapat terjadi jika proses negosiasi damai yang dilaksanakan sarat dengan tekanan dari pihak yang lebih kuat dalam hal ini pemerintah Mali beserta pendukungnya. Adanya kehadiran pihak ke 3 dalam proses damai dengan sikap yang tidak netral menjadi kelemahan dalam proses perdamaian di Mali

Berdasarkan kondisi diatas, dapat diambil jalan penyelesaian konflik dengan jalan damai yaitu 1) Membangun negosiasi damai antar pihak yang berkonflik dalam situasi persahabatan dengan saling menghormati; 2) Negosiasi damai dapat dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menghadirkan pihak ke - 3 guna menjamin netralitas; 3) saling menghormati dengan mendudukan kesamaan derajat sehingga tidak ada yang merasa benar dan kuat sehingga menimbulkan tekanan dalam proses negosiasi damai. Hal ini memanfaatkan peluang bahwa kedua belah pihak yang berkonflik punya itikad baik untuk menyelesaikan secara damai.

Penutup

Konflik vertikal di Mali yang berkepanjangan antara pemerintah Mali dengan kelompok pemberontak dari daerah Azawad (MNLA) yang menuntut kemerdekaan bagian Azawad (etnis Tuareg). Konflik Mali semakin kompleks dengan munculnya kudeta militer terhadap Presiden Mali karena pemerintah dianggap tidak mampu menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi. Beberapa kali diadakan kesepakatan namun tidak membuahkan hasil positif. Hal ini juga dipicu adanya campur tangan pihak ke-3 dalam konflik. Pemerintahan Mali didukung negara Prancis yang mendapat persetujuan dari Amerika. Sedangkan sebagai *counter of power* dari kelompok MNLA mendapat dukungan dari militansi Islam AQIM dan MUJAWO agen dari Al Qaeda yang memiliki agenda tersendiri atas bantuannya ke MNLA.

Lesson learned dari kasus konflik di Mali bahwa konflik vertikal dapat dipicu karena adanya diskriminasi atas identitas, pengakuan, maupun partisipasi dari warga negara. Sedangkan penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ke-3 terkadang justru menambah persoalan baru karena adanya sikap tidak netral dari aktor mediator yang mempunyai maksud tersendiri dengan memanfaatkan situasi konflik.

Solusi untuk mengakhiri konflik di Mali dapat ditempuh dengan jalan; 1) Memutus kehadiran semua pihak luar dari konflik vertikal di Mali baik pendukung pemerintah maupun pendukung kelompok MNLA guna menguraikan permasalahan konflik agar tidak menjadi bias; 2) Proses negosiasi intern antara pemerintah dan kelompok MNLA dilaksanakan secara *friendly negotiation* yaitu mengutamakan rasa saling menghormati atas dasar kesamaan hak yang dapat mengakomodir keinginan dari kedua belah pihak. Proses ini diharapkan perdamaian berjalan secara seimbang dan terbuka sehingga dapat memecahkan akar masalah utama serta dapat mengakomodir

keinginan kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan lanjutan di belakang hari. Penyelesaian konflik ini dilaksanakan dengan konsep menang-menang dengan win-win solution yaitu memberikan peluang kepada kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan atas solusi Bersama, sehingga kedua belah pihak dapat menerima dan komitmen untuk melaksanakan dengan etika baik dan bertanggungjawab.

Referensi ;

Dimas prihadi, "Memahami Konflik Di Mali-Misi Perdamaian PBB Paling Mematikan" Diakses dari <https://kumparan.com/dimas-prihadi/memahami-konflik-di-mali-misi-perdamaian-pbb-paling-mematikan>

Junjungan Sigalingging, "Pentingnya Diplomasi", Diakses dari <https://kumparan.com/junjungan-sigalingging>

Kumparan.com : "Memahami konflik di Mali" diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 19.00 dari <https://kumparan.com/dimas-prihadi/memahami-konflik-di-mali-misi-perdamaian-pbb-paling-mematikan-1rjUFSR4TXn/full>

Naskah Departemen Masstra, MP. Teori dan Sejarah Perang,

Naskah Departemen Sos Tek, MP. Diplomasi dan Negosiasi

Simon Fisher dkk, 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak, Terjemahan Rita Maharani dkk, Jakarta, *The British Council* Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press.

Letkol Arh Dr. Heri Wijanarko. S.Sos., M.Sc. adalah abituren Akmil 1996 dan lulusan Univ. Gadjah Mada saat ini menjabat sebagai Kasubdepmpa Depmipatek Akmil



KOPERASI JAJARAN TNI AD SIAP MEMBANTU BINA DAN KEMBANGKAN UMKM



Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 telah memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktifitasnya agar penyebaran virus corona dapat dicegah. Hal ini berakibat sektor ekonomi terkena imbasnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pada tanggal 19 Oktober 2020 di Jakarta, (dirilis CNBC Indonesia) mengatakan, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal II tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5,32% dan pada kuartal III mengalami pertumbuhan ekonomi minus 3,49%. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang mengalami minus 2 kuartal secara berturut-turut, maka Indonesia sudah masuk ke dalam zona resesi.

Dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi ini dikarenakan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang sekarang menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dalam berbagai kegiatan serta penerapan strategi pencegahan meliputi memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas serta interaksi (5M)

sehingga aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas (di perkantoran, fasilitas umum, berkendara, pabrik, kegiatan pendidikan dan lain-lain). Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Pekerjaan semakin sulit, banyak buruh pabrik yang diberhentikan dari perusahaannya, banyak hotel dan restoran tutup akibat tidak ada lagi yang memakai jasanya, pasar sepi karena daya beli masyarakat menurun, transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api dan bus sepi penumpang serta masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.



Dampak pandemi Covid-19 ini sangat dirasakan khususnya para pengusaha yang bekerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Selama pandemi Covid-19 ini, sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pelaku usaha tersebut yang gulung tikar karena permintaan jatuh. "Selama pandemi ini jujur saja banyak yang terhenti usahanya, sekitar 30 persen usahanya terganggu. Sedangkan yang memang terganggu tapi menciptakan inovasi-inovasi kreatif sekitar 50-70 persen, meskipun mereka terkena dampak," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan kepada **Liputan6.com**, (4/9/2020).

TNI AD sejak tanggal 25 Juli 1964 memiliki Koperasi dari tingkat pusat bernama Inkopad (Induk Koperasi Angkatan Darat), di tingkat Kodam bernama Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat), dan di satuan Korem, Kodim, batalyon, dan satuan lainnya bernama Primkopad (Primer Koperasi Angkatan Darat). Saat ini Koperasi TNI AD berjumlah 1032 (1 Inkopad, 20 Puskopad tipe A, 2 Puskopad tipe B dan 1009 Primkopad) tersebar di seluruh Indonesia. Pengesahan Akte Pendirian Inkopad dilakukan pada tanggal 20 Mei 1964 dengan nomor Badan Hukum 8205. Sementara Menteri Panglima Angkatan Bersenjata (Menpangab) memberikan pengesahannya pada tanggal 25 Juli 1964 dengan nomor: Kep. 805/7/1964," tulis *Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia*.

Dari latar belakang di atas, penulis akan memberikan sumbangan ide/gagasan/saran yang dapat bermanfaat untuk TNI AD dan masyarakat khususnya pelaku UMKM melalui sebuah kajian Koperasi Angkatan Darat siap membantu membina dan mengembangkan UMKM.

Pembahasan.

Saat ini masyarakat mengalami kesulitan yang luar biasa, terlebih masyarakat bawah

yang dikategorikan miskin dan pengangguran, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 1 tahun terakhir adanya penambahan orang miskin yang perlu mendapat perhatian kita bersama, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mencegah penyebaran virus corona. Pasalnya, aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan memengaruhi pendapatan penduduk. "Penduduk miskin naik 1,63 juta terhadap September 2019," ujar Suhariyanto dalam paparannya, Rabu (15/7/2020).

Selain kemiskinan yang perlu menjadi perhatian kita, pelaku UMKM, seperti yang penulis jelaskan di atas, bahwa selama pandemi Covid-19 ini, sektor UMKM juga mengalami kesulitan. Banyak pelaku UMKM yang gulung tikar karena permintaan jatuh. Dari 64 juta pelaku UMKM, selama pandemi ini banyak yang terhenti usahanya (sekitar 30%). Sedangkan yang terganggu tetapi masih bisa menciptakan inovasi-inovasi kreatif sekitar 50-70%.

Salah satu jati diri TNI adalah tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. TNI AD merupakan bagian masyarakat Indonesia, secara keseluruhan tentu ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat pada umumnya, sehingga TNI AD harus mengambil sikap dan langkah-langkah yang nyata untuk membantu kesulitan rakyat di sekitarnya. Seperti kewajiban TNI yang tercantum dalam 8 Wajib TNI yang ke-8 berbunyi "*Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya*" dan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat 1 menyatakan "*TNI memiliki tugas pokok antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari*

segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Ayat 2 poin 8 menyatakan *"Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta"* dan poin 9 menyatakan *"Membantu tugas pemerintahan di daerah"*.

Dari dasar dan data-data tersebut di atas, ini adalah momentum bagi TNI AD melalui Koperasi yang dimilikinya mengambil langkah-langkah yang adaptif dan proaktif untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat khususnya pelaku UMKM. Seluruh Koperasi jajaran TNI AD siap membantu membina dan mengembangkan UMKM, melalui kerja sama dan memulai usaha-usaha baru yang penuh inovasi dan kreasi sehingga dapat memberi keuntungan kepada pelaku UMKM dan Koperasi jajaran Angkatan Darat. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Koperasi jajaran Angkatan Darat adalah upaya internal dan eksternal. Upaya **internal** yaitu upaya untuk memantapkan Koperasi selaku soko guru ekonomi meliputi **pertama**, penyempurnaan organisasi Koperasi jajaran Angkatan Darat. Saat ini pengurus Koperasi jajaran Angkatan Darat terdiri atas Ketua, Komurnikop, Komurus, Komurben dan badan pengawas. Di semua Koperasi jajaran Angkatan Darat, jabatan-jabatan pengurus Koperasi dijabat oleh anggota satuan yang kurang profesional di bidang perkoperasian, usaha bisnis, perbendaharaan dan/atau audit keuangan. Mereka bermodal kepercayaan dari anggota Koperasi dan selanjutnya mau belajar sambil bekerja. Dengan terpisahnya Koperasi dari organisasi satuan, ini merupakan momentum bagi Koperasi untuk menyempurnakan organisasi Koperasi baik dari segi jumlah pengurus yang dibutuhkan ataupun kualitas pengurus. Koperasi dapat mempekerjakan tenaga profesional di bidang usaha bisnis, akuntan atau bendaharawan dan auditor. Upaya internal yang **kedua**, Koperasi jajaran Angkatan Darat dapat memperluas keanggotaan dan usaha Koperasi. Saat ini anggota Koperasi jajaran Angkatan Darat hanya berasal dari anggota satuan dan usaha

yang dilakukan hanya di bidang penjualan barang dan jasa. Untuk memajukan Koperasi, keanggotaan dapat diperluas dengan mengajak masyarakat sekitar satuan untuk menjadi anggota Koperasi dan memperluas usaha hingga sektor produksi dan distribusi barang dan jasa. **Ketiga**, meningkatkan tampilan dan pelayanan pada setiap unit usaha Koperasi. Koperasi jajaran Angkatan Darat dapat meniru penampilan dan kinerja swalayan modern dalam melayani pelanggannya. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, Koperasi jajaran Angkatan Darat dapat membuat *platform e-commerce* untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Upaya eksternal yaitu upaya Koperasi jajaran Angkatan Darat untuk dapat membantu membina dan mengembangkan UMKM. Bentuk upaya yang dapat dilakukan, antara lain: 1) Koperasi jajaran Angkatan Darat menyediakan pasar bagi barang dan jasa hasil produksi UMKM. Teknik pelaksanaannya dengan cara pertama, pelaku UMKM memasok barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti Sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang dibutuhkan prajurit dan keluarganya dengan harga yang terjangkau; kedua, pelaku UMKM bersama dengan Puskopad dan Primkopad di wilayah masing-masing mengadakan bazar/pasar murah untuk menjual barang-barang hasil produksi UMKM kepada masyarakat di area lapangan yang dimiliki oleh satuan jajaran TNI AD dengan tetap menegakkan Protokol Kesehatan (Prokes); ketiga, pelaku UMKM bersama-sama dengan Puskopad dan Primkopad di wilayah masing-masing membuka penjualan barang-barang secara online kepada prajurit dan masyarakat umum sebagai upaya diversifikasi pemasaran; keempat, Primkopad dapat melakukan distribusi barang-barang hasil produksi UMKM yang menjadi mitranya ke Primkopad lain yang ada di satuan dan/atau wilayah lain. 2) Koperasi jajaran Angkatan Darat membantu distribusi dan penjualan barang-barang hasil produksi UMKM, hal ini dapat dilakukan karena Puskopad dan Primkopad jajaran TNI AD memiliki jaringan yang tersebar

di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai ke daerah terpencil/terluar. 3) Koperasi jajaran Angkatan Darat dapat membantu permodalan kepada UMKM yang kekurangan modal usaha dengan bunga yang sama atau lebih kecil dari KUR atau dengan kredit lunak.



Kendala dan Kelemahan.

- Koperasi jajaran Angkatan Darat saat ini hanya fokus melayani dan memenuhi kebutuhan anggotanya sendiri. Unit usaha toko Koperasi hanya ada di dalam asrama saja, padahal bila dikelola dengan baik dapat bekerja sama dengan pelaku UMKM melayani masyarakat luas;
- Pengurus Koperasi bukan tenaga profesional sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, kurang inovatif dan kreatif dalam menjalankan usaha-usaha Koperasi, administrasi pembukuan belum diaudit dengan benar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian;
- Unit toko Koperasi jajaran Angkatan Darat belum nyaman dan selengkap swalayan modern. Hal ini menyebabkan anggota Koperasi sendiri tidak menjadikan toko Koperasi sebagai tujuan utama berbelanja

d. Tidak semua Komandan satuan paham dengan perKoperasian dan peduli dengan keberadaan Koperasi di satuannya, sehingga belum ada arahan dan bimbingan kepada pengurus Koperasi; dan

e. Koperasi jajaran Angkatan Darat tidak memiliki cukup gudang untuk dapat menampung barang-barang hasil produksi UMKM.

Peluang dan Harapan.

- Koperasi Angkatan Darat memiliki potensi yang besar berupa aset, modal dan pelanggan tetap yaitu anggota militer dan PNS Angkatan Darat sebagai pangsa pasar terbesarnya;
- Koperasi Angkatan Darat tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga ke pelosok daerah (daerah terpencil dan pulau terluar). Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pendistribusian dan pemasaran barang produksi UMKM serta melayani anggota Koperasi dan masyarakat luas;
- Koperasi Angkatan Darat dapat membeli secara langsung barang-barang hasil produksi industri rumah tangga (UMKM) untuk dijual kembali kepada anggota Koperasi dan masyarakat, sehingga harganya dapat lebih murah daripada harga di luar toko Koperasi;
- Atas seizin Komandan satuan, ketua Koperasi dapat memanfaatkan lahan kosong di satuan untuk dipakai usaha bersama dengan masyarakat (UMKM), agar masyarakat merasa terlindungi untuk dapat berusaha jualan di tempat yang disediakan oleh satuan, sehingga dapat membangkitkan kembali pelaku UMKM; dan
- Membuka peluang usaha baru dengan membangkitkan *home industry* dari keluarga besar TNI dan pelaku UMKM di sekitar satuan masing-masing, dipasarkan secara langsung maupun dengan secara *online* atau dapat bekerja sama dengan Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Gofood dan lain-lain.

Saran Rekomendasi.

Pertama, saran kepada Kasad, nama unit toko seluruh Koperasi jajaran Angkatan Darat disarankan menggunakan satu nama dan logo yang familiar dan mudah diingat masyarakat.

Penulis memberikan contoh “Army Mart” atau “Kartika Mart” serta diijinkan untuk mengembangkan unit toko Koperasi ke luar asrama sampai ke daerah terpencil/pelosok. Nama dan logo merupakan *branding* yang dapat memberikan banyak keuntungan yang pada akhirnya berimbas pula pada pemasukan. Tujuan dari branding adalah untuk menarik dan menjaga loyalitas konsumen dengan cara memberikan mereka produk yang selalu sejalan dengan apa yang telah dijanjikan oleh brand.



Kedua, saran kepada Inkopad, membuat aplikasi jual beli *online*, penulis memberikan saran nama aplikasi “Mitra Kartika”, untuk mengatasi kesulitan pemasaran, agar dapat menjangkau konsumen secara lebih luas baik militer maupun masyarakat umum, dengan biaya operasional yang lebih efisien, tidak terikat waktu dan biaya pemasaran yang lebih murah. Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbagai aktivitas, termasuk berbelanja. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan 5 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan

mengurangi mobilitas serta interaksi) untuk menghambat penyebaran virus corona membuat masyarakat memilih untuk berbelanja secara *online*. Para penjual termasuk unit usaha toko Koperasi jajan Angkatan Darat mau tidak mau harus beralih strategi baru untuk mengikuti perkembangan pola konsumsi masyarakat ke arah digital dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk berbelanja secara *online*.

Ketiga, TNI AD bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memberikan penghapusan pajak, agar barang-barang yang dibeli prajurit TNI melalui Puskopad dan Primkopad harganya lebih murah;

Keempat, TNI AD bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu untuk mendapat kepercayaan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada pelaku usaha mikro. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Sebagian besar Primkopad dapat memberikan bantuan pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro sampai dengan sebesar 50 juta Rupiah.

Penutup.

Rekomendasi dan upaya yang disampaikan di atas diharapkan Koperasi jajan Angkatan Darat dapat membantu membina dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melalui berbagai usaha dan kerja sama yang dapat membangkitkan UMKM yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

Keberadaan Inkopad dan Puskopad yang ada saat ini dapat menjadi motor penggerak bagi Primkopad, sehingga unit usaha Primkopad mampu bersaing dengan swalayan yang lebih modern dan mampu mengembangkan unit usaha toko Primkopad lebih baik di masa depan.

Kendala yang ada akibat pandemi Covid-19 saat ini dapat dijadikan peluang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Koperasi jajan Angkatan Darat untuk menambah usaha baru, agar dapat menambah keuntungan/SHU (Sisa Hasil Usaha) bagi usaha-

usaha Koperasi. Diversifikasi pemasaran produk dapat memanfaatkan media online baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Gofood untuk produk makanan dan dengan Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain-lain untuk produk berupa barang-barang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang nomor 3 tahun 2002
Pertahanan Negara

Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang
Koperasi.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa.

RUJUKAN ELEKTRONIK

Jurnal Lentera Bisnis DOI :
10.34127/jrlab.v9i2.380 Volume 9 No 2,
November 2020 ISSN Cetak 2252-9993, ISSN
Online 2598-618X 116

Virdita Ratriani, Kontan.co.id diakses pada 22
Februari 2021

Update corona Indonesia. Melalui
<https://nasional.kontan.co.id/news/update-corona-indonesia-jumat-52-tambah-11749-kasus-baru-taati-prokes>

Berapa jumlah UMKM di Indonesia. Melalui
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>

Inkopad bisnis Angkatan Darat beraset raksasa.
Melalui <https://tirto.id/inkopad-bisnis-angkatan-darat-beraset-raksasa-cM4o>



Image:Dewan Energi Nasional

Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. Adalah abituren
Akmil 1992 dan saat ini menjabat sebagai
Wadirlem Seskoad



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



9772086931295